

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KONSOLIDASI DEMOKRASI MELALUI PERAN PARTAI POLITIK
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

WIRDO NEFISCO, S.I.K., M.Si
KOMBESPOL. NRP. 70020386

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “ Konsolidasi Demokrasi Melalui Peran Partai Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasional “.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tanggal 24 Maret tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI Tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Hari Mulyono, S.E., M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, September 2022

Penulis



WIRDO NEFISCO, S.I.K., M.Si
KOMBES. POL. NRP. 70020386

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirdo Nefisco, S.I.K., M.Si

Pangkat : Komisariss Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Keamanan Negara

Baintelkam Polri

Instansi : Polri

Alamat : Jln. Trunojoyo no. 3 Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)

Angkatan ke 64 tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan sepenuhnya.

Jakarta, September 2022

Wirdo Nefisco, S.I.K., M.Si
Kombes. Pol. NRP. 70020386

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	11
8. Perundang – undangan	13
9. Kerangka Teori	14
10. Data dan Fakta	17
11. Pengaruh Lingkungan Strategis	24

BAB III PEMBAHASAN

13. Umum 27

14. Kaderisasi Kepala Daerah Oleh Partai Politik 32

15. Peran Partai Politik Dalam Mencetak Kepala Daerah Yang
Kapabel..... 40

16. Komunikasi Partai Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat..47

BAB IV PENUTUP

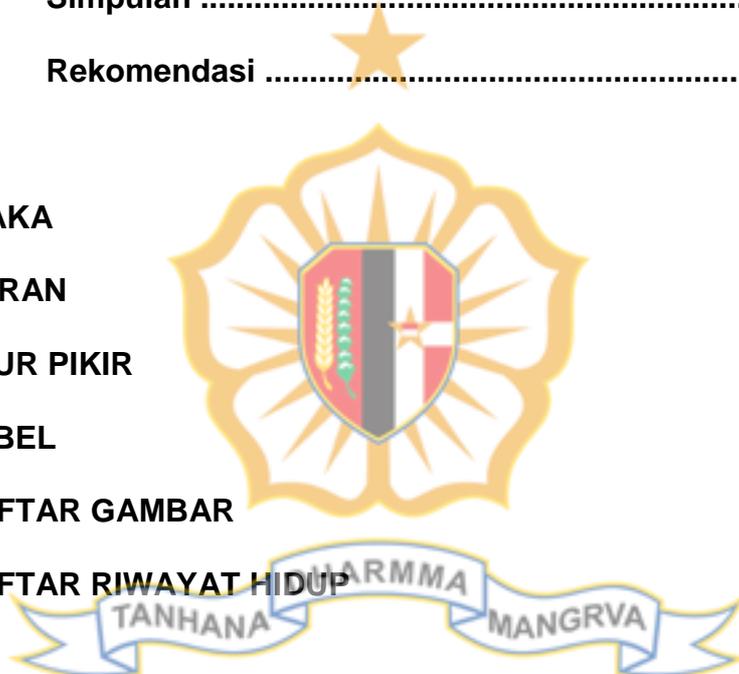
17. Simpulan 54

18. Rekomendasi 58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan kehidupan manusia. Pada pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara kota Yunani terutama Athena.¹ Demokrasi menjadi instrumen bagi rakyat untuk terlibat dalam mewarnai jalannya pemerintahan. Terdapat beberapa bentuk pemerintahan selain demokrasi antara lain :

- a) Monarki (kerajaan) yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan kaisar yang berlangsung seumur hidup dan turun temurun.
- b) Oligarki yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang memiliki kekayaan.
- c) Tirani yaitu pemerintahan yang dijalankan dengan sewenang – wenang.
- 4) Teknokrasi yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh orang keahlian di bidang tertentu.

Pasca reformasi bermunculan partai politik yang jumlah cukup banyak / multi partai dimana sebelumnya pada masa orde baru hanya berjumlah 3 partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Munculnya keinginan elemen masyarakat untuk mendirikan partai menunjukkan bahwa adanya keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam mewarnai ;proses kea rah yang lebih baik. Partai politik yang diharapkan dapat melakukan konsolidasi demokrasi kea rah yang lebih baik.

Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* sangat menghendaki adanya demokrasi.²Partai politik diharapkan memainkan perannya dalam mengelola negara, kekuasaan dan peraturan perundang – undangan

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/21/160000069/demokrasi-pengertian-sejarah-singkat-dan-jenis?page=all>, diakses tanggal 18 Maret 2022.

² Encik Muhammad Fauzan. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press.

dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Indonesia secara geografi terdiri dari berbagai pulau, terletak sangat strategis yaitu antara 2 samudera dan benua Asia dan benua Australia. Kekayaan geografi yang sangat besar ini harus dikelola dengan baik melalui pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah harus mampu memahami dan membaca potensi astagatra yang ada dalam lingkup wilayah kerjanya. Hal ini sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional.

Berbagai upaya yang telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan demokrasi yang dapat mensejahterakan rakyat. Demokrasi berasal dari dua kata demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan).³ Tujuan demokrasi adalah untuk menegakkan keadilan bagi semua individu secara merata karena masalah keadilan dapat menciptakan respon anarkis dari masyarakat jika tidak diimplementasikan secara merata.

Partai politik memiliki peran strategis dalam mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik merupakan kumpulan masyarakat yang terorganisir yang memiliki pandangan nilai dan cita – cita yang sama dengan tujuan untuk memperebutkan kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional.⁴ Partai politik juga merupakan mesin pencetak pimpinan nasional dan daerah yang dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Kemampuan strategis lainnya yang dimiliki oleh partai politik adalah dalam memproduksi undang – undang dimana kemampuan tersebut dapat diimplementasikan dalam Undang – Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Terkait hal ini partai politik dapat membuat undang – undang yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional baik skala jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Peran strategis partai politik di bidang legislatif sangatlah penting dalam

³ Georg Sorensen. 2002. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

⁴ Miriam Budiardjo. 2021. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Partai politik memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Sarana komunikasi politik.
- b) Sarana sosialisasi politik.
- c) Sarana kaderisasi politik.
- d) Sarana mengatasi konflik (*conflict management*).

Sebagai harapan berbagai elemen masyarakat, seharusnya partai politik dapat berkontribusi lebih besar terhadap negara bukan sebaliknya menciptakan potensi konflik, perpecahan dan tindakan yang melanggar hukum dalam kehidupan bernegara sehingga hal tersebut sangat kontraproduktif. Dalam konteks ini, penulis menfokuskan pada peran partai politik secara internal sesuai dengan fungsi tersebut di atas. Terkait pentingnya peran partai politik dalam memperkuat ketahanan nasional dalam menjaga eksistensi negara Indonesia baik potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Partai politik berusaha untuk merekrut anggota baru hadir dan melakukan kegiatan politik (*political recruitment*) dan melakukan proses pergantian pimpinan (*selection of leadership*).⁵ Kaderisasi di internal partai politik harus mampu menghasilkan pimpinan yang kapabel melalui komunikasi politik dengan menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Partai politik harusnya menyuguhkan tampilan kepala yang kapabel dan penuh komitmen terutama dalam hal pembangunan. Pembangunan ekonomi memiliki pengaruh positif dan negatif.⁶ Dalam konteks positif dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sedangkan negatifnya menimbulkan tindakan korupsi.

Kondisi ini tentunya sangat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan ketahanan di daerah sehingga kiprahnya akan memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional. Kepala daerah selaku pejabat publik

⁵ Bonar Simangunsong, Daulat Sinuraya. 2011. *Negara, Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta : Kharisma Virgo Print.

⁶ Adi Toegarisman. 2018. *Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional*. Jakarta : Buku Kompas.

harus memiliki perilaku yang terpuji saat melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan.⁷

Kepala daerah yang tidak kapabel terutama dalam melakukan pembangunan di daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional akan memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional. Peran partai politik melalui kaderisasi pemimpin daerah memiliki korelasi yang sangat kuat dalam mensukseskan pembangunan nasional di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan daerah.

Partai politik diharapkan lebih fokus dalam usahanya untuk berkontribusi dalam pengelolaan ketahanan nasional melalui rekrutmen calon kepala daerah karena hasilnya akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Jika seluruh partai politik memiliki komitmen yang sama dalam melakukan konsolidasi demokrasi ke arah yang lebih baik maka peran partai politik dalam meningkatkan pembangunan sangatlah penting.

Partai politik yang tidak dapat memberikan kontribusi maksimal melalui kepala daerah yang telah dipilih maka akan mempengaruhi dinamika keamanan di berbagai daerah dimana hal tersebut akan mempengaruhi ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia (Tannas) adalah merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHC, baik yang datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.⁸

Pasca reformasi dinamika politik di Indonesia memasuki fase eforia yang berlebihan dimana masyarakat menginterpretasikan demokrasi sebagai alat kebebasan yang berlebihan sehingga sering berkontraksi negatif terhadap kepentingan orang lain. Pemilu dan Pilkada yang telah dilaksanakan beberapa kali menunjukkan tingkat polarisasi yang sangat tajam sehingga dapat mengganggu keamanan negara dan dapat melumpuhkan ketahanan nasional.

⁷ Adies Kadir. 2018. *Menjaga Moral Pejabat Publik*. Jakarta : PT. Semesta Merdeka Utama.

⁸ Pokja Ketahanan Nasional Lemhannas, 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional, hal.41

Hal ini harus menjadi evaluasi komprehensif melalui konsolidasi demokrasi. Peran partai politik sangat strategis dalam proses konsolidasi demokrasi guna menghasilkan kualitas demokrasi sehingga hal tersebut diwujudkan salah satunya dalam proses pembangunan di berbagai daerah dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Hal tersebut dapat terwujud apabila seluruh partai politik memiliki komitmen kebangsaan dengan mengacu pada empat konsesus dasar bangsa Indonesia dalam mendesign pembangunan nasional dimana hal tersebut akan dieksekusi oleh para kepala daerah yang telah dipilih oleh masing – masing partai politik.

Partai politik harus mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 merupakan titik tolak untuk mencapai visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia maju.⁹ Peran partai politik untuk mensukseskan pembangunan nasional dapat dilakukan melalui seleksi pimpinan nasional dan pimpinan daerah yang kapabel. Hal tersebut dapat dilakukan melalui demokrasi yang transparan. Hanya demokrasi yang memiliki seleksi calon pemimpin mulai dari bawah hingga puncak (*bottom up*).¹⁰

Dalam konteks ini maka eksistensi partai politik dalam menyeleksi calon kepala daerah belum optimal. Masih sering terjadi proses pemilihan calon kepala daerah oleh partai politik tidak demokratis tetapi lebih mengutamakan kepentingan pragmatis. Hal ini terlihat dari banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi selama Pilkada pascareformasi. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kemajuan bangsa terutama dalam memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah telah mencederai semangat demokrasi dimana oknum kepala daerah tidak aspiratif dalam menangkap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Seharus partai politik melakukan pemilihan kader partai untuk menjadi calon kepala daerah dengan mengutamakan semangat demokratis dan mengutamakan kualitas sehingga akan muncul kepala daerah yang kapabel.

⁹ Pokja Sistem Manajemen Nasional, 2022. Materi Pokok Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional, hal.78
¹⁰ Hendarmin Ranadireksa.2009. *Visi Bernegara Arsitektur Kontruksi Demokratik*. Bandung : Fokus Media.

2. Rumusan Masalah

Terkait dengan berbagai penjelasan yang disampaikan di atas maka penulisan akan difokuskan pada upaya untuk merubah kondisi yang tidak produktif agar lebih maksimal. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “ **Bagaimana mengoptimalkan konsolidasi demokrasi melalui peran partai politik dalam menghasilkan kepala daerah berkualitas guna memperkuat ketahanan nasional ?** ”.

Sehubungan dengan penegasan dari rumusan masalah yang telah kontruksikan maka harus dijabarkan melalui elemen pertanyaan kajian guna memperdalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun pertanyaan kajian antara lain :

- a. Bagaimana proses kaderisasi kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik?.
- b. Bagaimana partai politik dalam menghasilkan kepala daerah yang kapabel ?
- c. Bagaimana komunikasi partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait kaderisasi kepalan daeran ?

3. Maksud dan Tujuan

a Maksud dari penulisan Taskap ini untuk menguraikan dan mencari solusi yang tepat bagi konsolidasi demokrasi dengan peran partai politik guna memperkuat ketahanan nasional terutama dalam menghasilkan calon kepala daerah yang bersumber dari kader partai yang berkualitas dan tidak melakukan tindak pidana korupsi dan perbuatan tercela lainnya.

..

b. Tujuan penulisan Taskap ini adalah mengetahui secara komprehensif terkait masalah konsolidasi demokrasi yang terjadi saat ini dimana masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki terutama melalui peran partai politik dalam menghasilkan kepala daerah yang kapabel. Melalui peran partai politik yang profesional diharapkan mampu melakukan perubahan yang signifikan. Tulisan ini sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang Lingkup.** Dalam penulisan Taskap ini lebih menfokuskan pada peran partai politik dalam melakukan kaderisasi kepala daerah dalam rangka menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan di daerah dan dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional.

b. **Sistematika**

1) Bab – I. Pada Bab I berisi uraian latar belakang permasalahan penulisan terkait konsolidasi demokrasi yang menjadi sentral isu dimana partai politik memiliki peran dalam rangka mengembalikan iklim demokrasi ke jalan yang diharapkan. Pasca reformasi menjadi titik awal yang sangat penting dalam mengarahkan demokrasi ke arah yang benar dimana hal tersebut tidak berjalan dan cenderung ke arah yang salah pada saat rezim orde. Reformasi memberikan peluang emas bagi elemen bangsa untuk melakukan perubahan dan mendudukan demokrasi ke jalan yang benar. Tetapi selama proses reformasi hingga sekarang masih terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan demokrasi sehingga perlu melakukan konsolidasi demokrasi. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan hal tersebut terutama dalam kaderisasi calon pimpinan nasional maupun pimpinan daerah dengan pemilihan yang demokrasi. Faktanya masih ada pimpinan daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang merupakan produk kaderisasi partai politik tidak sesuai harapan sehingga sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan di daerah. Pimpinan daerah yang terlibat pelanggaran hukum akan berdampak pada citra partai politik dan kredibilitas daerah tempat bertugas. Dampak lainnya adalah terganggunya pembangunan di daerah tersebut sehingga akan berpengaruh pada ketahanan daerah yang akan berkontribusi pada lemahnya ketahanan nasional.

2) Bab – II. Pada Bab ini menguraikan beberapa peraturan perundang – perundangan dan teori yang akan digunakan dalam membahas permasalahan dalam penulisan Taskap terkait konsolidasi demokrasi melalui peran partai politik dalam rangka ketahanan nasional. Pembahasan diperkuat dengan data sekunder hasil tinjauan pustaka yang diperoleh melalui teks book dan jual yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan Taskap.

3) Bab III. Bab ini akan menjelaskan analisa terhadap rumusan masalah yang telah disusun guna memperdalam dan mengetahui secara terkait permasalahan yang sedang terjadi dengan penanaman pada ruang lingkup dari penulisan sehingga analisa yang dilakukan lebih fokus dan terarah. Analisa diperkuat oleh data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.

4) Bab IV. Pada Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh melalui analisa yang mendalam permasalahan dalam rangka memberikan masukan kepada pemangku kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Dalam penulisan Taskap ini, penulisan menggunakan metode analisis kualitatif / deskriptif dalam rangka melakukan penelitian secara mendalam dengan mengacu sumber buku, artikel. Metode deskriptif analisis merupakan cara penelitian dengan mengumpulkan data, menghubungkan dan mengolah data tersebut melalui analisis yang mendalam guna mengetahui permasalahan yang terjadi. Dengan mempelajari dan mengaitkan berbagai data maka dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap masalah yang terjadi.

b. Pendekatan.

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif ketahanan nasional dengan menggunakan analisis multidisplin ilmu dengan kerangka teori yang telah disiapkan sebelumnya sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti secara lebih mendalam.

6. Pengertian

Dalam tulisan Taskap terdapat beberapa kata yang digunakan terkait dengan permasalahan dimana kata tersebut harus dijelaskan agar memberikan gambaran guna mendukung penulisan Taskap. Adapun beberapa kata yang perlu mendapatkan penjelasan anatara lain :

a. Konsolidasi

Konsolidasi adalah usaha untuk memperteguh dan memperkuat hubungan persatuan, peleburan dua golongan (pihak) menjadi satu.¹¹

b. Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Pengertian demokrasi secara etimologi tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan yang dibentuk merupakan kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada pemerintah untuk mengakomodir kepentingan rakyat.

c. Partai Politik

Partai politik merupakan kumpulan masyarakat yang terorganisir yang memiliki pandangan nilai dan cita – cita yang sama dengan tujuan untuk memperebutkan kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional.

d. Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional Indonesia (Tannas) adalah merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang

¹¹ Risa Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya, Serbajaya

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

d. Monarki

Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan kaisar yang berlangsung seumur hidup dan turun temurun.

e. Oligarki

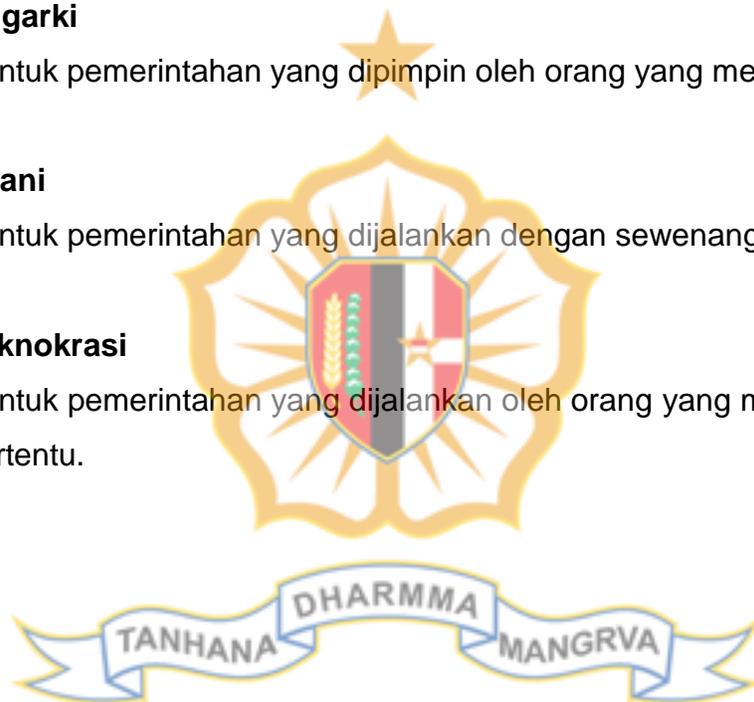
Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang memiliki kekayaan.

f. Tirani

Bentuk pemerintahan yang dijalankan dengan sewenang – wenang.

g. Teknokrasi

Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Konsolidasi demokrasi merupakan suatu bentuk upaya untuk mengembalikan karakter demokrasi pada kondisi yang benar dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Sementara menurut Larry Diamond, konsolidasi demokrasi adalah suatu proses pencapaian legitimasi yang kuat sehingga aktor politik yang signifikan baik pada level elit maupun massa percaya bahwa pemerintahan yang dilaksanakan adalah yang paling tepat bagi masyarakat.¹² Melalui peran partai politik diharapkan demokrasi dapat direkonstruksi ke arah yang sangat dirasakan oleh rakyat dimana pemerintahan yang terbentuk akan menjalankan amanat rakyat. Demokrasi yang berjalan dengan baik yang diimplementasikan dalam Pemilu dapat mempengaruhi postur dan kekuatan ketahanan nasional. Rezim orde baru telah melumpuhkan semangat demokrasi dimana elemen – elemen demokrasi tidak melakukan tugas demokrasinya secara bebas. Elemen – elemen demokrasi antara para elit partai politik, elit sosial, *civil society* dan kelompok kepentingan. Pemerintahan orde baru diwarnai dengan tindakan represif, feodalisme, oligarki, korupsi, kolusi dan nepotisme serta terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan. Hal ini telah ditegaskan oleh Lord Acton : mengatakan “ *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* “. ¹³ Hal ini telah terjadi terhadap pemerintahan otokrasi dan tirani dimana rakyat tidak terlibat dalam proses pemerintahan dan diperlakukan sewenang – wenang. Dalam konteks ini, rakyat dijadikan sebagai objek oleh kekuasaan. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep demokrasi dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi sehingga keputusan politik harus mengutamakan rakyat

¹² https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=637&keywords=, diakses tanggal 20 Mei 2022.

¹³ Moh. Mahfud MD. 2007. *Perbedaan hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia..

Dalam konsep demokrasi rakyat diberikan kebebasan dan ruang dalam keterlibatannya dalam proses pemerintahan agar dapat berjalan dan memenuhi aspirasi masyarakat dalam memberikan kesejahteraan dan keamanan. Demokrasi yang dijalankan pasca tumbanganya rezim orde baru hingga saat ini, masih diwarnai oleh perebutan kekuasaan dengan menggunakan segala cara terutama dengan menggunakan uang sebagai senjata yang sangat ampuh untuk memenangkan kontestasi pemilu. Sementara budaya korupsi masih terus terjadi dimana pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi yang dikuat melalui TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Tetapi dalam pelaksanaan selama 24 tahun harapan publik belum dapat terealisasikan. Korupsi masih terjadi baik di level daerah maupun nasional yang dilakukan oleh pejabat pemangku kepentingan eksekutif, legislative maupun eksekutif. Hal ini akan mempengaruhi akan meningkatkan ketidakpercayaan publik yang akan berdampak pada terganggunya proses konsolidasi demokrasi.

Partai politik yang menjadi instrument penting dalam mempercepat konsolidasi demokrasi masih belum mampu melakukannya. Masyarakat masih diperlihatkan dengan perebutan kekuasaan yang dilakukan saat kontestasi pemilu. Sementara partai politik yang telah diberi kekuatan yuridis oleh undang – undang baik dalam keikutsertaannya dalam Pemilu dan proses rekrutmen calon kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) sebagai upaya mempercepat konsolidasi demokrasi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pertarungan calon kepala daerah di internal partai politik masih diwarnai persaingan yang tidak sehat. Pemilihan kader untuk menduduki jabatan kepala daerah masih diwarnai politik uang (*money politic*) sehingga sangat sulit untuk menghasilkan kepala daerah yang kapabel. Hal ini tentunya akan menanbah runyamnya proses konsolidasi demokrasi sesuai harapan agenda reformasi tahun 1998. Partai politik tidak dapat menyuguhkan kualitas demokrasi sesuai dengan harapan masyarakat. Kegagalan partai politik dalam merawat demokrasi ke arah yang lebih baik akan berdampak terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat sesuai dengan cita – cita bangsa. Partai politik harus memainkan perannya secara maksimal dengan melakukan pembenahan secara internal dalam memilih kepala daerah yang kapabel agar dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Dalam konteks ini, penulis akan menguraikan berbagai masalah pencalonan kepala daerah oleh partai politik dengan menggunakan perangkat peraturan, perundangan – undangan dan kerangka teori guna memperdalam pengetahuan terhadap permasalahan yang terjadi sehingga dapat mencari solusi strategis yang dapat digunakan di masa yang akan datang.

8. Peraturan Perundang – Undangan

a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi pedoman bagi partai politik dalam menjalankan agenda politiknya di berbagai wilayah di Indonesia. Partai politik memiliki peran sangat strategis dalam mewarnai demokrasi sehingga potret demokrasi yang tidak demokratis menjadi tanggung jawab partai politik. Partai politik memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain : melakukan komunikasi politik, sosialisasi politik, kaderisasi dan manajemen konflik. Melalui fungsi yang dimiliki maka terlihat hubungan yang signifikan terhadap baik dan buruknya demokrasi di Indonesia.

Melalui undang – undang partai politik akan digambarkan peran partai politik dalam menjalankan demokrasi mulai dari komunikasi politik, sosialisasi, kaderisasi dan manajemen konflik. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh partai politik dalam menciptakan iklim demokrasi yang demokratis terutama terkait pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan ketahanan nasional. Terkait rekrutmen kader secara jelas disebutkan dalam pasal 11 huruf e UU no. 2 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pengisian jabatan tersebut diperoleh melalui Pemilu. Menurut Andrew Reynold bahwa sistem Pemilu sangat penting karena sistem Pemilu adalah sarana rakyat.¹⁴ Pemilu merupakan elemen penting dalam pelaksanaan demokrasi dalam rangka memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Partai politik harus memanfaatkan ajang Pemilu dan Pilkada dengan mengusung sosok calon pimpinan yang berkualitas.

¹⁴ Ridho Imawan Hanafi. 2021. Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan instrumen bagi kepala daerah untuk melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam menggambarkan sejauhmana kepala daerah mengakselerasi pembangunan aspek sumber kekayaan alam, demografi dan geografi serta aspek ideologi, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan di daerah.

c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Dalam pasal 47 ayat 6 menyebutkan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.¹⁵ Aturan yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada sangat jelas tetapi dalam prakteknya tidak dijalankan dengan bertanggung jawab.

d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digunakan untuk menggambarkan proses demokrasi terutama dalam melaksanakan pemilihan umum. Undang – Undang Pemilu sebagai instrument untuk mengukur pelaksanaan demokrasi sesuai dengan aturan yang ada.

9. Kerangka Teori

a. **SCRS Analysis** merupakan intstrumen yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan guna mencari solusi yang tepat agar permasalahan tersebut dapat segera diperbaiki. SCRS merupakan singkatan dari *Strategy, Current State, Recruitment, Solution*. SCRS analysis digunakan untuk memahami peran partai politik dalam konsolidasi terutama dalam melakukan rekrutmen kader yang seharusnya dilakukan secara transparan dan

¹⁵ <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1627.pdf>, dikases tanggal 18 Juni 2022

profesional sehingga menghasilkan pimpinan yang berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai sangatlah strategis dan diharapkan dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku sehingga menghasilkan kepala daerah yang sangat diharapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Elemen SCRS analysis dapat menggambarkan proses rekrutmen yang benar dan mengetahui kelemahan yang selama ini terjadi. Adapun penjelasan dari SCRS analysis sebagai berikut :

1) Strategy (Strategi). Strategi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam melakukan kaderisasi kader partai politik untuk menduduki jabatan pimpinan nasional dan daerah. Partai politik harus melakukan dengan strategis yang tepat dalam menghasilkan pimpinan berkualitas guna melakukan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Melalui elemen strategi maka mengetahui upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam menghasilkan kader terbaik di setiap pemilu.

Partai politik dalam melaksanakan strategi terkesan mengabaikan nilai – nilai yuridis yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga menghasilkan kepala daerah yang tidak kapabel dan bermasalah dalam melaksanakan visi dan misinya.

2) Current State (Kondisi Nyata). Hal ini diperlukan untuk melihat rekrutmen yang telah dilakukan oleh partai politik dimana masih sangat mengecewakan berbagai pihak terutama banyak yang terlibat tindak pidana dalam pelaksanaan tugasnya. Kondisi nyata yang ditampilkan terutama dalam proses demokrasi terkait proses kaderisasi internal dan pemilihan kepala daerah yang kapabel masih menjadi krisis kepercayaan publik yang harus dijawab oleh partai politik. Melalui analisa *current state* akan terlihat keseriusan dan komitmen partai politik dalam melakukan

komunikasi dan proses rekrutmen yang selama ini terjadi. Perilaku partai politik yang tidak profesional dapat memberikan dampak negatif terhadap proses konsolidasi demokrasi dan berdampak terhadap melemahnya ketahanan nasional. Proses kaderisasi yang tidak transparan akan menghasilkan kepala daerah yang bermasalah.

3) Requirement (Persyaratan). Persyaratan yang digunakan dalam melakukan kaderisasi seseorang dalam organisasi sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks partai politik yang akan melakukan kaderisasi calon pimpinan nasional dan daerah sangatlah strategis sehingga persyaratan harus menjadi variabel penting. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk 'Trust terhadap Institusi Politik, Isu-isu Mutakhir dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024'. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik terendah dibanding institusi lainnya.¹⁶

4) Solution (Pemecahan masalah). Permasalahan yang dihadapi partai politik sebagai pilar demokrasi yang diharapkan mampu menunjukkan kinerja dalam melakukan proses demokrasi terutama dalam kaderisasi calon kepala daerah dan memilih kepala daerah yang kapabel harus segera dilakukan evaluasi dan pembenahan secara komprehensif. Dengan alat analisa SCRS guna mengetahui peran partai politik yang belum maksimal dapat ditemukan pemecahan masalah dengan mencermati berbagai hal yang menjadi kelemahan partai politik dalam melakukan rekrutmen kader partai untuk mejadi kepala daerah melalui Pemilu.

b. Teori Situasi Historik Teori yang menjelaskan keberadaan partai politik untuk mengatasi krisis dalam masyarakat seperti legitimasi, integrasi, dan

¹⁶ <https://www.republika.co.id/berita/r9r9i9396/survei-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-terendah-tni-paling-tinggi>, dikases tanggal 7 Juni 2022

partisipasi.¹⁷ Teori digunakan untuk memberikan gambaran terkait munculnya partai politik baru akibat partai politik tidak dapat menghasilkan kepala daerah berkualitas secara demokratis.

c. Teori Sifat Orang – Orang Besar (*Traits of Great Men*). Teori yang menggambarkan sosok pimpinan yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdesaan emosional dalam melakukan tugasnya sehingga kemajuan yang dicapai didukung bawahannya.¹⁸ Teori yang diajukan penulis guna menggambarkan partai politik dalam mencetak calon kepala daerah yang berkualitas sehingga memahami secara komprehensi terhadap kendala dan peluang sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan berdampak pada ketahanan nasional secara maksimal. Partai politik memiliki peran strategis dalam melakukan konsolidasi demokrasi seharusnya memilih pemimpin yang berkualitas dengan kriteria yang tangguh.

d. Teori Manajemen. G. R. Terry menggambarkan bahwa manajemen adalah upaya mencapai suatu kemajuan organisasi melalui langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Langkah ini dikenal dengan POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*).¹⁹ Teori manajemen digunakan dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui langkah – langkah manajemen sehingga diharapkan menghasilkan kepala daerah yang kapabel.

Berbagai organisasi modern sangat membutuhkan manajemen dalam memfokuskan kemajuan organisasi termasuk partai politik. Manajemen akan mengarahkan organisasi pada tujuan yang optimal melalui cara kerja yang efektif dan efisien terutama dalam melakukan komunikasi politik dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam memilih kader partai untuk menjadi kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia.

¹⁷ Lili Romli.2021. *Partai Politik*.Malang : Intrans Publishing..

¹⁸ Kartini Kartono. 1991.*Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : CV. Rajawali.

¹⁹ Kartini Kartono, *Op.Cit.*,. hal.150

10. Data dan Fakta. Praktik rasuah yang mengemuka di awal tahun, sekali lagi ibarat fenomena gunung es. Sudah menjadi rahasia umum bahwa akar masalah dari maraknya korupsi kepala daerah salah satunya karena tingginya biaya politik. ICW mencatat (2018), mahal nya biaya politik setidaknya disebabkan dua hal yakni, politik uang berbentuk mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*). Menurut kajian Litbang Kemendagri tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai bupati / wali kota hingga gubernur membutuhkan biaya Rp 20 – 100 miliar. Sementara, pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode.²⁰

Berbagai praktek yang dilakukan kepala daerah merupakan siklus negatif dari proses politik yang terjadi di internal partai. Proses rekrutmen, kompetisi yang tidak transparan dan traksaksional menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas kepala daerah. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah hasil dari proses politik masih akan terjadi jika tidak dibenahi secara sistematis oleh pimpinan partai. Kepala daerah yang terpilih akan tersandera dengan jabatan yang embank karena harus tetap loyal kepada partai.

Praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tidak hanya terjadi di satu daerah tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi kesamaan perilaku secara umum dan akan terus berjalan terhadap siapapun yang dipilih oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menunjukkan proses demokrasi yang dilakukan oleh partai politik terlihat setengah hati dimana hal ini berlanjut terus walaupun KPK telah melakukan penegakkan hukum terhadap oknum kader partai politik yang telah menimbulkan sikap skeptis berbagai pihak.

Partai politik yang diharapkan sebagai *role model* dalam menjalankan proses demokrasi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dengan banyaknya jumlah partai menciptakan persaingan yang semakin tinggi antar partai politik sehingga menyebabkan upaya untuk tetap *survive* akan dilakukan dengan segala cara dan merusak proses rekrutmen di internal partai. Sikap yang tidak yakin eksistensi partai jika melakukan kontestasi dalam tataran normatif menciptakan persaingan yang tidak

²⁰ <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-0>, diakses tanggal 16 Mei 2022

sehat antar partai politik. Hal ini berdampak terhadap kualitas demokrasi yang dihasilkan terutama terlihat dalam pemilihan kepala daerah yang merupakan siklus lima tahun sekali. Fakta yang mengungkapkan terjadi *money politic* dalam proses kontestasi kepala daerah memberikan pelajaran dan pengalaman politik yang tidak baik terhadap generasi muda politik yang akan memasuki dunia politik. Jika ini terus dibiarkan maka akan merusak wajah demokrasi Indonesia baik di dalam dan luar negeri. Seharusnya setiap partai politik mengikuti aturan dan menjaga sahwat politik dalam setiap proses demokrasi terutama setiap kontestasi pemilihan kepala daerah sehingga dapat mencetak pimpinan yang kapabel dan bermoral.

Upaya pembenahan yang terjadi pada partai politik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Pembiaran yang dilakukan akan berdampak luas terhadap proses pembangunan nasional yang sangat memerlukan percepatan di tengah persaingan regional dan global yang semakin kompetitif. Kesadaran tinggi sangat diperlukan dalam membangun iklim demokrasi pasca rezim orde baru sehingga bangsa Indonesia tidak terjebak dalam penderitaan yang telah dialami²¹ dalam kurun waktu yang cukup lama. Momentum untuk melakukan perubahan secara revolusional terutama dalam mencetak kepala daerah yang kapabel sangatlah mutlak diperlukan di era komtemporer. Jika partai politik tidak mengambil langkah cepat maka akan selamanya tertinggal dengan negara lain yang terus melakukan pembenahan dalam melakukan konsolidasi demokrasi terutama dalam mencetak kader kepala daerah yang unggul. Semangat kompetisi yang sehat harus ditunjukkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi pembelajaran yang berguna bagi generasi penerus. Perilaku koruptif dan mempertahankan zona nyaman yang berdampak destruktif bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi akan memberikan kerugian yang besar bagi kemajuan negara di tengah persaingan dengan negara lain.

Kredibilitas kepala daerah yang merupakan produk dari proses politik merupakan hal penting dalam memantapkan langkah demokrasi bangsa Indonesia. Kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengakselerasi kemajuan daerah. Kapasitas *skill*, pengetahuan, moral dan etika

²¹ <https://www.radarcirebon.com/2018/10/27/tim-sukses-penyebab-kepala-daerah-korupsi-ini-penjelasan-kemendagri/>, diakses tanggal 16 Mei 2022

seorang kepala daerah harus menjadi ukuran dalam pemilihan setiap lima tahun sekali. Partai politik diharapkan menerapkan aturan ketat dalam kaderisasi di internal partai. Jika aturan tidak dijalankan secara demokratis maka akan menciptakan oknum kepala daerah.

Partai politik yang kredibel tidak membiarkan para calon kepala daerah terjebak dalam siklus korupsi karena hal tersebut sangat berdampak pada pembangunan di berbagai daerah dan akan memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kaderisasi kader partai politik yang berkompetisi dalam Pilkada harus melalui seleksi yang ketat dengan mengutamakan kualitas sumber daya manusia guna mengeliminir berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih.

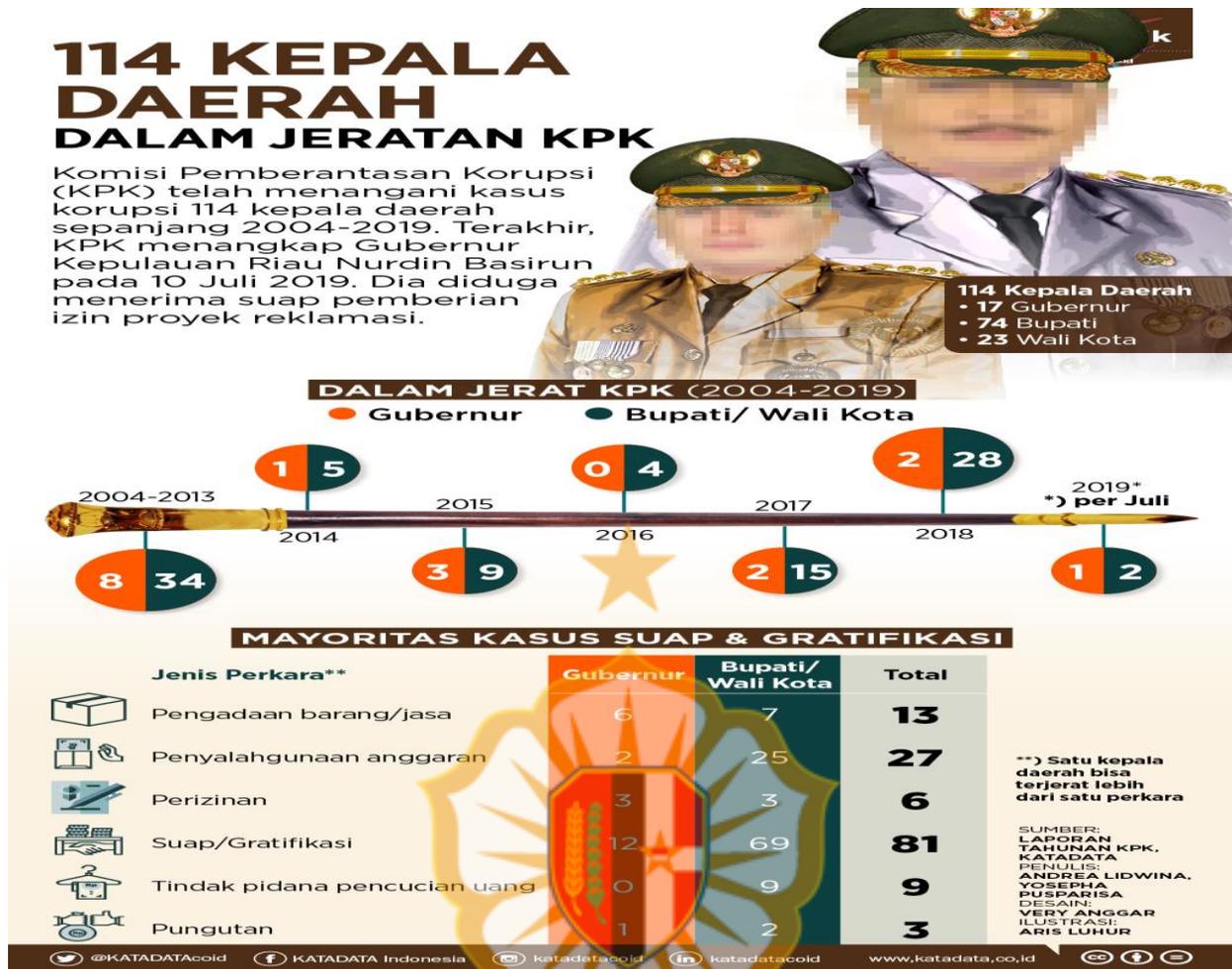


Gambar 1 : 19 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK di Tahun 2018

Data di atas menggambarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah dengan berbagai latar belakang partai politik. Praktek korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua partai politik tetapi telah dilakukan oleh beberapa

114 KEPALA DAERAH DALAM JERATAN KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus korupsi 114 kepala daerah sepanjang 2004-2019. Terakhir, KPK menangkap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019. Dia diduga menerima suap pemberian izin proyek reklamasi.



Gambar 2. 114 Kepala Daerah Dalam Jeratan KPK²²

partai politik. Hal ini menunjukkan kepala daerah yang dihasilkan oleh partai politik cenderung untuk mengejar keuntungan pribadi.

Data di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh kepala daerah selama periode 2004 – 2019 sangatlah memprihatinkan publik dimana korupsi yang dilakukan dengan cara suap dan gratifikasi. Kondisi ini harus menjadi evaluasi yang sangat serius bagi seluruh partai politik sehingga korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dapat dihentikan. Partai politik harus melakukan kaderisasi kader partai untuk menduduki jabatan kepala daerah yang dilakukan secara terbuka dengan

²² <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>, diakses 20 Juni 2022

mengutamakan kualitas dan menyerap aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan tidak melakukan korupsi dan perbuatan tercela lainnya.

Korupsi Kepala Daerah



UNIVERSITAS GADJAH MADA

JABATAN	Total	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Anggota DPR dan DPRD	274	23	10	103	20	23	19	9	8	16	5	27	8	7	2	0	0	0
Kepala Lembaga/Kementerian	28	4	2	1	0	2	3	9	4	1	0	2	1	1	0	1	1	0
Duta Besar	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
Komisioner	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0
Gubernur	21	0	1	2	1	1	3	3	2	0	0	1	2	1	1	2	0	1
Walikota/Bupati dan Wakil	122	10	18	30	13	9	4	12	3	3	3	4	5	6	6	3	0	0
Eselon I / II / III	230	10	26	24	43	10	7	2	7	8	15	12	14	22	10	15	9	2
Hakim	22	0	0	5	3	1	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0
Jaksa	10	0	3	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Polisi	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengacara	12	0	1	4	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Swasta	308	32	59	56	28	28	18	16	24	16	10	8	11	12	3	5	4	1
Lainnya	157	31	33	31	13	21	3	8	8	2	1	8	4	3	2	1	4	0
Korporasi	6	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1262	110	154	260	123	99	62	61	60	49	38	65	45	55	27	29	23	4

Sumber: KPK RI (2021)

- Sejak 2004 hingga 2020 total 143 kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK

ugm.ac.id

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

Tabel 1. Korupsi Kepala Daerah Sejak Tahun 2002 Hingga Tahun 2020.²³

Hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam proses rekrutmen di internal partai politik. Proses kaderisasi yang tidak demokratis menjadi persoalan partai karena akan menghasilkan para pembuat kebijakan yang mengabaikan kepentingan publik.²⁴ Korupsi yang dilakukan mulai tahun 2002 hingga 2020 menunjukkan perilaku yang berulang dan harus menjadi evaluasi yang serius bagi partai politik dalam menciptakan iklim demokrasi yang bertanggung jawab.

Korupsi yang dilakukan sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Seharusnya hal ini tidak terjadi jika praktek *money politic* dapat dihindari dalam praktek demokrasi. Banyak kepala daerah yang terlibat korupsi dalam menjalankan tugas pemerintahannya sangat mengkhawatirkan

²³ <https://kumparan.com/kumparannews/pukat-ugm-korupsi-di-pemda-memprihatinkan-sudah-561-kasus-sejak-2004-1vVyB8cupgc/1/gallery/2>, diakses tanggal 16 Juni 2022

²⁴ Ibid. hal 227.

perjalanan bangsa ke depan karena hal tersebut akan menjadi role model negatif dan akan ditiru oleh pejabat publik lainnya dan masyarakat dimana dampaknya akan semakin memperlemah ketahanan nasional.

21

No.	Nama	Kepala Daerah	Tanggal OTT KPK
1.	H. Abdul Latif Dkk	Bupati Hulu Sungai Tengah	4 Januari 2018
2.	Nyono Wiharli Suhandoko Dkk	Bupati Jombang	3 Februari 2018
3.	Marianus Sae	Bupati Ngada	11 Februari 2018
4.	Imas Aryuminingsih	Bupati Subang	13 Februari 2018
5.	Mustafa Dkk	Bupati Lampung Tengah	14 Februari 2018
6.	Adriatma Dwi Putra dan Asrun	Walikota Kendari dan mantan Walikota Kendari	28 Februari 2018
7.	Abu Bakar Dkk	Bupati Bandung Barat	11 April 2018
8.	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan	15 Mei 2018
9.	Agus Feisal Hidayat	Bupati Buton Selatan	23 Mei 2018
10.	Tasdi	Bupati Purbalingga	4 Juni 2018
11.	M. Samanhudi Anwar	Walikota Blitar	8 Juni 2018
12.	Syahri Mulyo	Bupati Tulungagung	8 Juni 2018
13.	Irwandi Yusuf dan Ahmadi	Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah	5 Juli 2018
14.	Pangonal Harahap Dkk	Bupati Labuhan Batu	18 Juli 2018
15.	Zainudin Hasan Dkk	Bupati Lampung Selatan	26 Juli 2018
16.	Setiyono Dkk	Walikota Pasuruan	3 Oktober 2018
17.	Neneng Hasanah Yasin	Bupati Bekasi	15 Oktober 2018
18.	Sunjaya Purwadisastra Dkk	Bupati Cirebon	25 Oktober 2018
19.	Remigo Yolanda Berutu	Bupati Pakpak Bharat	17 November 2018
21.	Ahmad Marzuqi	Bupati Jepara	4-5 Desember 2018
22.	Irvan Rivano Muchtar	Bupati Cianjur	12 Desember 2018

*1 mantan kepala daerah

Tabel 2. 23 kepala daerah yang tertangkap tangan KPK selama 2018:²⁵

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah semakin masif di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa produk kepala daerah yang dihasilkan oleh partai politik sangat tidak profesional. Hal ini harus menjadi perhatian yang sangat serius guna menghadapi proses demokrasi di tahun 2024. Pimpinan daerah yang kapabel harus dihasilkan oleh partai politik guna menghadapi tantangan dunia yang semakin kompetitif dan hal tersebut dapat dilakukan dengan komitmen politik yang tinggi. Sementara masih ada kepala daerah

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/2018-darurat-korupsi-kepala-daerah-lt5c225b3630aa2?page=2>, diakses tanggal 17 Juni 2022.

yang memiliki kinerja yang baik seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bogor Bima Arya dan lain – lain.Sugiarto.

11. Pengaruh Lingkungan Strategis

a. Global

1) Perkembangan Teknologi Digital

Di era revolusi industri 4.0 yang diwarnai dengan perkembangan teknologi digital yang telah merambah ke berbagai penjuru dunia. Hal ini telah mempengaruhi aktifitas kehidupan dengan penggunaan *smartphone* dan *media internet* dimana hal juga mempengaruhi aktifitas politik. Dunia politik telah mengalami perubahan dengan munculnya teknologi digital dimana hampir setiap kegiatan politik menggunakan teknologi. Teknologi digital telah memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap kehidupan manusia termasuk dunia politik.

Melalui teknologi digital, partai politik dapat melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan konstituen dan masyarakat melalui media digital sehingga informasi terkait program dan agenda partai politik dapat diketahui dengan cepat selain melakukan tatap muka. Melalui peran media massa, masyarakat dapat mengetahui partai yang memiliki kredibilitas yang baik dengan partai politik yang hanya menampilkan pencitraan. Masyarakat akan semakin dewasa dalam melihat dinamika politik yang terjadi baik saat kondisi normal maupun saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Pada saat perhelatan Pemilu dan Pilkada, masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan melalui media elektronik secara langsung. Perkembangan kegiatan kampanye hingga perhitungan suara dan sengketa Pemilu dan Pilkada. Masyarakat dapat melihat dan mengikuti perkembangan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dari awal hingga akhir. Hal ini tidak terjadi saat belum berkembangnya teknologi digital dimana informasi hanya diperoleh melalui media cetak. Perkembangan teknologi

digital juga memberikan dampak negatif dalam dunia politik seperti muncul hoaks, provokasi dan politik identitas yang dapat mengganggu semangat persatuan dan kesatuan.

2) **Pandemi Covid 19.**

Dampak pandemik Covid 19 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 dimana proses pemilu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hal ini menimbulkan penyesuaian pemilih terhadap situasi pandemik dimana kampanye dilakukan secara virtual, proses pemilihan menjadi mahal karena harus melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, *hand sanitizer*, dan lain – lain. Disamping itu terdapat resiko terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Pandemi covid 19 membatasi kegiatan masyarakat termasuk kegiatan politik dimana saat awal terjadi banyak korban yang meninggal dunia sehingga menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan kegiatan rapat dan pertemuan secara tatap muka. Kegiatan dilakukan secara online guna meminimalisir dampak negatif pandemic covid 19 yang dapat menimbulkan kematian. Hal ini juga berpengaruh terhadap berbagai kegiatan masyarakat termasuk kegiatan politik.

3) **Elizabeth Truss Terpilih Sebagai Perdana Inggris.**

Terpilihnya Elizabeth Truss sebagai perdana menteri perempuan Inggris dapat memberikan energy bagi partai politik dalam meningkatkan kaderisasi kepala daerah sesuai dengan keadilan gender. Hal ini berimplikasi terhadap dinamika politik di Indonesia dalam kontestasi politik terutama terkait pimpinan nasional dan daerah tidak hanya didominasi oleh pria tetapi perempuan memiliki kesempatan politik yang sama untuk menduduki jabatan kepala daerah. Terpilihnya perdana menteri Inggris memberikan gambaran bahwa perempuan memiliki peluang yang dengan laki – laki untuk berkarir di dunia politik.

b. Regional. Krisis ekonomi di Sri Lanka menyebabkan guncangan politik dengan dilaksanakannya unjuk rasa rakyat untuk menuntut mundur Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Situasi yang terjadi di Sri Lanka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam proses demokrasi yang menghasilkan pemimpin dimana Presiden Sri Lanka terpilih terlihat tidak berdaya dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di negaranya. Masyarakat global termasuk Indonesia melihat seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan mengambil langkah melarikan diri ke luar negeri. Hal ini dapat menimbulkan sikap skeptis masyarakat terhadap proses demokrasi yang dapat berimbas pada kepercayaan rakyat terhadap pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

c. Nasional. Fakta demokrasi Indonesia dalam memilih kepala daerah dimana praktek Pilkada yang masih diwarnai dengan *money politic* akan memberikan pengaruh dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Partai politik belum mampu menghadirkan kontes demokrasi yang dapat dijadikan pedoman bagi generasi yang akan datang sehingga hal ini akan terus menghasilkan calon pimpinan daerah yang tidak profesional dan pragmatis sehingga akan menghambat konsolidasi demokrasi ke arah yang lebih baik. Komitmen bersama seluruh partai politik sangat diperlukan guna memperkuat kemajuan bangsa dengan menunjukkan praktek demokrasi yang *fair* sehingga langkah tersebut akan menghasilkan kader yang berkualitas yang akan memperkuat kemajuan bangsa.

Partai politik yang tidak dapat menghadirkan kepala daerah yang berkualitas akan mempengaruhi pengelolaan aspek asta gatra yang terdiri dari trigatra (sumber daya alam, demografi dan geografi). Kepala daerah harus mampu mengelola sumber daya alam, demografi dan geografi sehingga dapat memperkuat panca gatra (ideologi, sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan). Kepala daerah yang bermasalah akan sulit untuk mengelola tri gatra terutama sumber daya alam sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah yang kapabel sangatlah diperlukan dalam memajukan suatu daerah dengan melakukan berbagai perubahan.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Peran partai politik sangat menentukan dalam kehidupan nasional sesuai dengan amanat konstitusi. Belum maksimalnya peran partai politik dalam konsolidasi demokrasi terutama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mencatat, Indeks Ketahanan Nasional pada Juni 2020 adalah 2,70. Dalam skala 1 hingga 5— dengan semakin besar angka, berarti ketahanan nasional Indonesia semakin baik.²⁶ Skor indeks ketahanan nasional memiliki korelasi dengan peran partai politik dalam mengeksekusi kader partai untuk menjadi kepala daerah.

Sebanyak 34 gubernur dan 514 bupati dan walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara data korupsi menunjukkan bahwa masih banyak kepala daerah terlibat korupsi dimana hal sangat mempengaruhi ketahanan daerah. Kepala daerah yang tidak kapabel dapat menggerus nilai ketahanan daerah dan akan mempengaruhi ketahanan nasional. Lemahnya ketahanan daerah mengindikasikan lemahnya kemajuan di asta gatra yaitu Trigatra (Sumber Kekayaan Alam, Demografi dan Geografi) dan Pancagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan. Hal ini akan mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara masih ada beberapa kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi dalam menjalankan tugas sehingga hal ini harus menjadi evaluasi bagi partai politik.

Peran partai politik sangat strategis dalam mengatasi permasalahan bangsa untuk bergerak lebih maju. Peran yang sangat menentukan kehidupan adalah memilih presiden dan wakil presiden dan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) termasuk anggota legislatif. Pada masa orde baru jumlah partai politik hanya 3 partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Jumlah partai politik yang ideal ini tidak berjalan sesuai demokrasi yang

²⁶ <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/11/28/menjaga-ketahanan-nasional>, diakses tanggal 18 Juni 2022.

diharapkan. Pada awal pasca reformasi partai politik yang dibentuk sebanyak 184 partai sedangkan tahun 2004 sebanyak 200 partai, hal tersebut semakin berkurang seiring dengan perkembangan politik di Indonesia.²⁷

Implementasi demokrasi di era reformasi diharapkan mampu memberikan perubahan dan harapan masyarakat. Tetapi kenyataannya masih jauh dari arti demokrasi yang sesungguhnya dimana para aktor dan elemen demokrasi masih terjebak dengan kepentingan kelompok dan individu sehingga membuat Indonesia sulit mengalami perubahan baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun mencetak pimpinan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari beberapa kali Pilkada yang telah dilaksanakan pasca reformasi belum mampu mengangkat kemajuan ekonomi di berbagai daerah. Sebaliknya publik selalu disungguhkan penangkapan para kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) termasuk anggota legislatif terkait kasus korupsi. Lingkaran korupsi (*corruption cycle*) terlihat telah membelenggu individu dan kelompok masyarakat sehingga makin memperlemah kemajuan bangsa. Perilaku korupsi telah dianggap sesuatu yang biasa terjadi sehingga mengarah pada situasi status quo. Dalam pasal 76 ayat 1 huruf e Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.²⁸ Beberapa faktor yang menyebabkan kepala daerah melakukan korupsi antara lain :

a. **Monopoli kekuasaan dan diskresi kewenangan.** Agenda reformasi tahun 1998 telah mengamanat Indonesai untuk menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi tetapi hal tersebut tidak terwujud. *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga yang berbasis di Hongkong, membeberkan hasil survei yang menyebutkan Indonesia sebagai Negara paling korup di antara 16 Negara se-Asia Pasifik. Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang

²⁷ Lili Romli. 2021. *Partai Politik : Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia*. Malang : Intrans Publishing.

²⁸ https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf, diakses tanggal 26 Juli 2022.

disurvei pada tahun 2010.²⁹ Data tersebut menunjukkan bahwa keseriusan dalam pencegahan tindak pidana korupsi belum maksimal. Hal ini akan menambah parah pencapaian pembangunan nasional yang akan berdampak pada minim kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan masih menampilkan aroma korupsi sehingga menjadikan pejabat pemerintahan, pengusaha dan masyarakat tertarik dalam pusaran korupsi. Kepala daerah dengan aturan otonomi daerah menjadikan seseorang yang memiliki kewenangan yang besar sehingga menimbulkan keinginan untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Penggunaan anggaran daerah, pelaksanaan proyek dan perijinan yang tidak transparan menjadi peluang besar untuk melakukan korupsi. Monopoli kekuasaan dan dikresi kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah sangat membahayakan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada pembangunan nasional. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Lord Acton sejarawan Inggris yang mengatakan “ *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* “. ³⁰

b. Budaya masyarakat yang permisif. Masyarakat Indonesia dikenal sangat ramah dan masih adanya semangat menerima dan memberi dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka mereduksi hal tersebut maka harus dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait budaya korupsi. Sikap permisif masyarakat mendorong tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Perilaku masyarakat yang menunjukkan keramahan dengan menunjukkan sikap timbal balik dengan memberi dan menerima sangat baik jika dilakukan secara profesional tetapi tidak digunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Sikap permisif sangat memiliki pengaruh besar terhadap dinamika korupsi dan hal tersebut telah mempengaruhi perilaku masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

c. Lemahnya pengawasan. Pengawasan memiliki peranan sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pengawasan internal yang lemah

²⁹ <https://www.kompasiana.com/herdiansyah/55006c07a333111d72510bff/anatomi-korupsi>, diakses tanggal 29 Juli 2022

³⁰ Moh. Mahfud MD. 2007. *Perbedaan hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

akan menyulitkan pencegahan korupsi. Terjadi berbagai kasus korupsi yang dilakukan pemangku kepentingan di *bureaucracy office* dan *political office* menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Hal ini jika tidak dibenahi maka berbagai kasus korupsi masih akan tetap terjadi. Pengawasan harus dilakukan oleh sistem dan yang lebih penting adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Orang yang ditugaskan haruslah memiliki integritas, tegas, moral dan etika yang tinggi sehingga tidak mudah untuk melakukan kolusi terhadap perilaku korupsi. Fakta yang terjadi adalah mudah para pengarus untuk diajak kolusi sehingga pencegahan korupsi menjadi sangat sulit. Dalam konteks pencegahan korupsi sangat diperlukan orang yang tegas, integritas, memiliki moral dan etika yang tinggi sehingga pengawasan akan dilakukan secara transparan. Pengawasan harus dilakukan setiap saat guna mencegah indikasi penyimpangan terhadap anggaran belanja daerah dan proses pelayanan perijinan. Hal tersebut juga harus dilakukan dengan menggunakan pelayanan elektronik yang terintegrasi guna menutup celah terjadi kontak fisik antara masyarakat dan aparat pemerintah. Penggunaan teknologi di bidang pelayanan masyarakat dengan menggunakan teknologi harus dilakukan guna mengurangi kontak fisik antara masyarakat dengan aparat negara.

d. Lemahnya akuntabilitas. Akuntabilitas yang lemahnya dapat memberikan celah bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi. Pertanggung jawaban anggaran daerah, pelaksanaan proyek pembangunan menyebabkan carut marut korupsi di berbagai daerah. Kolusi antara pemerintah daerah DPRD dalam proses akuntabilitas keuangan menyebabkan semakin suburnya perilaku korupsi di antara pejabat pemerintah daerah dan legislatif. Pelaksanaan akuntabilitas yang tidak transparan akan semakin memperburuk kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kurang komitmen dalam menjalankan amanat sebagai kepala daerah dalam melakukan pertanggung jawaban transparan terkait masalah anggaran dapat memberikan celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seharusnya kepala daerah dalam menjalankan tugasnya terutama terkait penggunaan anggaran harus dilakukan

secara transparan sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sebagai standar citra kinerja pemerintah daerah.

e. **Natural Resources Curse.** Sumber kekayaan alam di era otonomi daerah dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi dimana kewenangan perijinan di daerah telah menciptakan pola korupsi. Tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah dan jajaran pemerintahan di bawahnya meningkat pasca otonomi daerah.³¹ Daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar belum tentu berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat karena manfaat kekayaan alam tersebut cenderung dinikmati oleh elit pemerintahan dan para pengusaha dengan melanggar aturan.

Produk kepala daerah oleh partai politik tidak mencerminkan semangat demokrasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap index demokrasi di Indonesia di mata dunia pada tahun 2021. Indonesia menduduki peringkat ke – 64 dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6,3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6, 48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.³² Hal ini disebabkan masih adanya *money politic*, permainan dengan penyelenggara pemilu dan politik identitas.

Sementara unsur – unsur penegak demokrasi terdiri dari negara hukum, masyarakat madani dan aliansi kelompok strategis (partai politik, kelompok kepentingan, media). Demokrasi merupakan instrumen untuk membentuk suatu pemerintahan dengan menggunakan hak pilih rakyat guna memilih seorang pemimpin untuk mengakomodasi kepentingan rakyat. Pada awalnya demokrasi, pemilihan dilakukan secara langsung dimana jumlah masyarakat masih sedikit dan tidak tersebar secara geografi sehingga masyarakat langsung dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin dan membahas rancangan undang – undang secara langsung terkait

³¹ Agung Pambudhi. 2021. *Janji Otonomi Daerah : Perspektif Ekonomi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

³² <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>, diakses tanggal 27 Juli 2022.

permasalahan yang dihadapi.. Seiring berjalannya waktu telah terjadi perubahan konstruksi demokrasi dimana pemilihan langsung dinilai tidak sejalan perkembangan jumlah penduduk sehingga melahirkan pemilihan dengan konsep demokrasi tidak langsung. Demokrasi perwakilan mengharuskan rakyat memilih para perwakilan yang akan diduduk di legislatif untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini yang menyebabkan terjadi kompetisi di antara partai politik untuk memperebutkan kekuasaan *bureaucracy office* dan *political office* dengan cara yang tidak sehat sehingga memunculkan *politic cost*. Dengan dilakukan demokrasi perwakilan maka kekuatan rakyat beralih pada partai politik yang dianggap dapat mewakili aspirasi rakyat di DPR pusat maupun daerah termasuk pemilihan kepala daerah dan pimpinan nasional. Kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik mendorong untuk terjadi embrio penyalahgunaan dalam praktek demokrasi.

Partai politik menjadi instrumen yang sangat penting dalam praktek demokrasi terutama pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif di seluruh Indonesia. Banyaknya jumlah kepala daerah dan anggota legislatif yang berasal dari kader partai politik menjadikan potensi bisnis politik di internal partai politik. Hal ini akan menimbulkan persaingan kader dengan saingannya baik di internal maupun di luar partai politik dalam memperebutkan jabatan politis baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dalam pemilihan kader untuk bertarung dalam Pilkada, partai politik memegang kekuasaan yang besar untuk menentukan kader partai yang layak maju setiap kontestasi Pilkada di seluruh Indonesia. Kekuasaan yang mutlak dimiliki oleh partai politik dalam penentuan kader sering tidak objektif dan lebih memdahulukan kepentingan elit.

13 Kaderisasi Kepala Daerah Oleh Partai Politik

Diperlukan *figure* kepala daerah yang berkualitas untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif. Pemilihan kepala masih cenderung tidak demokratis dan sarat money politik. Sementara dalam pasal 47 ayat 6 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang

diterima. Partai politik harus menghindari pola yang tidak baik baik dalam kaderisasi kepala daerah dan memilih kader yang berkualitas. Partai – partai mesti menjaga keseimbangan antara dua peran : peran demokratis memilih calon yang paling baik mewakili para pemilih pertanya dan apa yang ahli politik James Ceaser sebut peran “ penyaring, “ menyisihkan mereka yang mengancam demokrasi atau tidak cocok memegang jabatan.³³Terkait hal ini maka partai politik yang harus segera meningkatkan kapasitasnya dengan menampilkan kinerja yang unggul dengan mengenyampingkan kepentingan politis. Proses kaderisasi kepala daerah yang tidak demokrasi menimbulkan berbagai permasalahan antara lain :

a. Kepala daerah terlibat masalah hukum.

Masih banyak kepala daerah yang terlibat masalah korupsi dan pelanggaran lainnya sehingga hal ini dapat menghambat program pembangunan daerah di berbagai bidang dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan kepala daerah terhadap masalah hukum terutama korupsi telah memberikan kontribusi terhadap lambatnya pembangunan di berbagai daerah sehingga hal ini menjadi contoh buruk bagi perilaku pejabat di mata masyarakat. Hal ini disebabkan oleh transaksional untuk menjadi kepala daerah dengan nominal yang sangat tinggi.

b. Turunnya kepercayaan masyarakat

Dampak yang ditimbulkan adalah banyak kepala daerah yang terjaring tindak pidana korupsi oleh KPK dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang terpilih tidak sepenuhnya melaksanakan amanah rakyat dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan dimana jika hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan oleh kepala daerah tanpa melihat kepentingan politis maka 514 kepala daerah menjadi sumber kekuatan utama dalam meningkatkan kekuatan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

³³ Steven Levitsky, Daniel Ziblatt. 2021. *Bagaimana Demokrasi Mati : Apa Yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

d. Kesejahteraan masyarakat tidak meningkat

Produk kepala daerah yang dihasilkan oleh partai politik menimbulkan banyak permasalahan sehingga berdampak terhadap tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan dampak lebih luas dimana akan menggerus kepercayaan rakyat demokrasi yang dinilai tidak dapat membawa kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi yang tidak berjalan dengan semestinya mengindikasikan telah terjadi erosi demokrasi dimana para elemen demokrasi yang terdiri dari elit politik, partai politik, kelompok kepentingan telah terjebak dengan kepentingan jangka pendek. Steven Levitsky & Daniel Ziblatt (2019) berpendapat bahwa, erosi demokrasi terjadi selangkah demi selangkah, kadang sangat kecil langkahnya.³⁴ Selanjutnya akan terakumulasi sehingga dapat menghancurkan demokrasi dalam jangka panjang seperti dalam pelaksanaan pemilu hanya memuluskan sekelompok orang yang menjadi loyalis partai.

Teori situasi historik yang menjelaskan keberadaan partai politik untuk mengatasi krisis dalam masyarakat seperti legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Hingga saat ini keberadaan partai politik masih fokus pada kepentingan pragmatis dengan memperjuangkan kepentingan partai untuk meraih kemenangan dalam Pemilu dan Pilkada. Dalam pasal 221 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Partai politik harus mampu mengatasi krisis demokrasi dengan memperkuat legitimasi, integrasi nasional dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan nasional dengan melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Partai politik yang tidak dapat mengatasi berbagai permasalahan bangsa harus segera melakukan aksi politiknya agar dapat menghadirkan kepala daerah yang berkualitas sebagai solusi menyelesaikan berbagai persoalan. Adapun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa antara lain masalah kemiskinan,

³⁴ <https://mudanews.com/opini/2021/07/31/erosi-demokrasi/>, diakses tanggal 13 Agustus 2022

³⁵ <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

pengangguran, korupsi, pendidikan, ideologi transnasional, dampak negatif dunia maya dan lain – lain. Dengan perkembangan masyarakat dan teknologi akibat pengaruh globalisasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan yang harus diatasi dimana otoritas partai politik dinilai tidak maksimal dan menampilkan kepala daerah yang bermasalah. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan yang dinilai harus segera dipecahkan dimana dalam penyelesaiannya dinilai lambat sehingga menyebabkan keraguan terhadap legitimasi dan partisipasi sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dengan mendirikan partai politik. Hal ini sejalan dengan teori situasi historik dimana partai politik diharapkan mampu mengatasi krisis legitimasi, integrasi dan partisipasi tetapi dengan berbagai permasalahan yang ada dan tidak dilakukan secara optimal oleh kepala daerah maka menimbulkan keinginan untuk mendirikan partai politik.



Gambar 3. Enam Partai Politik Baru³⁶

³⁶ <https://www.suaralidik.com/inilah-6-partai-baru-bakal-berpartisipasi-pada-pemilu-2024/>, diakses tanggal 12 Agustus 2022.

Seharusnya partai politik yang telah eksis harus menunjukkan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan tidak melakukan pelanggaran sehingga kepercayaan rakyat akan semakin kuat dan tidak memunculkan lahirnya partai politik baru yang akan menyelesaikan permasalahan yang dinilai tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang telah memiliki legitimasi. Adapun partai baru yang lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2024 adalah Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima), Partai Gelora Indonesia dan Partai Ummat. Teori situasi historik merupakan respon dari permasalahan legitimasi, integrasi dan partisipasi yang tidak dapat diselesaikan sehingga memunculkan untuk ikut menyelesaikan masalah dengan mendirikan partai politik baru agar dapat berkontribusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi terutama masalah korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Untuk memperkuat analisa terkait kelemahan yang dilakukan partai politik dalam mempercepat konsolidasi demokrasi terutama dalam kaderisasi calon kepala daerah maka harus dilakukan pembersihan yang profesional agar pimpinan daerah yang dihasilkan partai politik dapat meningkatkan pembangunan secara nasional. Oleh karena itu maka dalam tulisan ini digunakan SCRS (*Strategy, Current State, Requirement, Solution*) analysis yang merupakan alat analisa untuk memahami suatu masalah dan melakukan pemecahan permasalahan tersebut agar hal – hal yang menjadi sumber masalah dapat segera dipecahkan. Dalam memahami permasalahan partai politik dalam mengembalikan arah demokrasi menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan masyarakat maka harus dilakukan langkah pemecahan terutama peran partai politik dalam kaderisasi pimpinan kepala daerah dalam memuluskan konsolidasi demokrasi. Adapun SCRS analysis digunakan untuk menganalisa kaderisasi partai politik dalam menghasilkan kepala daerah agar lebih konsisten dengan mempedomi aturan yang ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku sehingga mampu menghasilkan kulaitas kepala daerah yang dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat..

- a. **Strategy (Strategi)**. Penentuan rekomendasi calon kepala daerah lebih mementingkan pada kedekatan dan kepentingan jangka pendek faksi daripada

alasan kesamaan visi dan tujuan partai politik itu sendiri³⁷ Partai politik harus memiliki strategi yang tepat dalam menghasilkan calon kepala daerah dengan mengutamakan kualitas dan profesionalisme dan menghindari kepentingan politis jangka pendek. Strategi yang harus dilakukan oleh partai politik dalam melakukan kaderisasi yaitu :

1) **Meningkatkan pendidikan politik**

Pendidikan politik kepada semua kader partai merupakan upaya untuk memahami politik baik secara teori maupun praktis dengan mengutamakan politik yang demokratis menghindari perilaku buruk dan perbuatan curang dalam berpolitik. Pendidikan politik diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan politik demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi berbagai persoalan bangsa, memajukan bangsa dan negara dan menjadikan Indonesia kuat dan berjaya. Sejak dini para kader diarahkan untuk tidak melakukan politik kotor tanpa lebih mengedepankan hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait Pilkada. Para kader lebih mengedepankan kualitas dan kinerja serta moral dan etika dalam ruang publik sehingga hal ini dapat meningkatkan elektabilitas dan kredibilitas partai.

2) **Melakukan pembinaan kader yang profesional**

Pembinaan kader harus dilakukan secara profesional dengan melakukan penilaian secara periodik dengan berbagai kriteria penilaian. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan intelektual, manajerial dan emosional. Kristalisasi nilai wawasan kebangsaan (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945 dan NKRI) dan penguatan moral dan etika harus menjadi syarat utama untuk menjadi calon kepala daerah. Semua penilaian harus diranking sehingga memudahkan partai untuk mengajukan calon kepala daerah terbaik di internal partai politik.

³⁷ <https://kumparan.com/awang-dharmawan/matinya-kaderisasi-partai-politik-dalam-pilkada-1uBA1hN5mYJ/full>, diakses tanggal 2 Agustus 2022.

3) Melakukan pemilihan yang demokratis

Partai politik harus membangun iklim demokratis yang sehat dalam pemilihan kader partai yang akan diusung untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas internal partai dan menghindari embrio konflik akibat ketidakpercayaan dan saling curiga antar kader partai sehingga hal ini dapat memperlemah soliditas partai secara internal.

4) Menghilangkan mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*)

Mahar politik dan jual beli suara merupakan elemen perusak dalam proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini telah menjadi strategi oleh sebagian besar partai politik dalam kontestasi Pilkada sehingga hal ini telah menghambat kader – kader partai berkualitas untuk maju dalam Pilkada. Munculnya kepala daerah yang tidak kapabel sangat merusak persepsi masyarakat terkait demokrasi.

5) Mengimplementasikan *punishment and reward* (hukuman dan penghargaan) yang tegas.

Penerapan pemberian hukuman dan penghargaan yang tegas tidak hanya diberikan kepada para kader tetapi juga kepada para Pembina dan senior partai yang berkontribusi untuk tidak mentaati aturan partai dalam kontestasi politik. Ketegasan dalam pemberian hukuman dan penghargaan terhadap para kader partai akan memberikan energy bagi partai politik dalam melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas.

b. Current State (Kondisi Nyata). Kondisi nyata (*current state*) menjelaskan bahwa potret yang terjadi pada demokrasi Indonesia saat ini terutama peran partai politik dalam memimpin lahirnya para pemimpin di tingkat daerah yaitu dalam memilih calon gubernur, bupati dan walikota masih

menyisakan permasalahan moral dan etika dimana pemilihan yang dilakukan belum memenuhi konsep demokrasi.

Partai politik yang menjadi ujung tombak untuk mempercepat konsolidasi demokrasi harus segera melakukan pembenahan tata kelola internal partai dengan kaderisasi kader – kader yang berkualitas dengan memiliki pengetahuan level global, regional dan nasional dan hal tersebut dirawat secara berkelanjutan. Partai politik harus menghilangkan kepentingan jangka pendek yang dapat merugikan citra partai dan krisis kepercayaan masyarakat. Data dan fakta menunjukkan bahwa kepala daerah yang merupakan produk partai politik banyak terlibat masalah korupsi. Kondisi ini harus menjadi evaluasi total untuk melakukan langkah – langkah  secara internal terutama dalam proses kaderisasi calon kepala daerah.

c. Requirement (Persyaratan). Partai politik dalam melakukan kaderisasi terkait calon kepala daerah harus menyajikan kader – kader yang berkualitas dimana kepemimpinan, pengetahuan, emosional, manajerial, etika dan moralnya dapat dipertanggung jawabkan sehingga hal ini akan menciptakan kepala daerah yang mampu membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah yang dipilih harus memenuhi persyaratan yang ketat dan harus selalu dilakukan evaluasi sehingga akan melahirkan kepala daerah yang tangguh.

d. Solution (Pemecahan masalah). Pentahapan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan kaderisasi calon kepala daerah mulai dari menetapkan strategi dengan memahami kondisi yang terjadi dan menetapkan persyaratan yang ketat diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat sehingga akan muncul calon kepala daerah yang berkualitas dan kapabel. Pemecahan masalah terkait kader partai politik yang bermasalah setelah terpilih menjadi kepala daerah diharapkan tidak terulang karena hal tersebut dapat menimbulkan sikap apatis terhadap partai politik karena tidak dapat mengatasi permasalahan dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

14. Peran Partai Politik Dalam Mencetak Kepala Daerah Yang Kapabel

Partai politik merupakan organisasi besar yang harus dikelola dengan profesional dalam rangka menciptakan kondusifitas nasional dan menghasilkan pimpinan nasional dan daerah. Hal ini sangat krusial dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi fakta yang terjadi bahwa penentuan rekomendasi calon kepala daerah lebih mementingkan pada kedekatan dan kepentingan jangka pendek faksi daripada alasan kesamaan visi dan tujuan partai politik itu sendiri.³⁸

Partai politik memiliki peranan yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Disamping terlibat langsung dalam mewarnai pembangunan juga dapat memberikan dukungan politik terhadap pembangunan nasional. Tetapi hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan karena partai politik cenderung lebih mengutamakan kepentingan politik partai dan kelompoknya. Hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 13 huruf c UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Partai politik merupakan kumpulan masyarakat yang terorganisir yang memiliki pandangan nilai dan cita – cita yang sama dengan tujuan untuk memperebutkan kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional.³⁹

Pembangunan nasional di satu sisi sangat membutuhkan dukungan politik dimana dengan masih banyaknya jumlah partai politik. Strategi pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024 antara pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Partai politik dapat menyampaikan kepada konstituen dan masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi politik.

³⁸ <https://kumparan.com/awang-dharmawan/matinya-kaderisasi-partai-politik-dalam-pilkada-1uBA1hN5mYJ/full>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

³⁹ Miriam Budiardjo. 2021. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sementara masih banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang terlibat tindak pidana menimbulkan kesan bahwa sistem kaderisasi pimpinan yang dilakukan oleh partai politik masih terjadi kelemahan dan cenderung transaksional sehingga kepala daerah dan anggota legislatif yang terpilih merasa tersandera dengan jabatan yang diemban. Terkait rekrutmen kader secara jelas disebutkan dalam pasal 11 huruf e Undang – Undang no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pengisian jabatan tersebut diperoleh melalui Pemilu. Menurut Andrew Reynold bahwa sistem Pemilu sangat penting karena sistem Pemilu adalah sarana rakyat.⁴⁰

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh gubernur, bupati dan walikota termasuk anggota DPR RI maupun DPR daerah menunjukkan sinyal bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ideal. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia cenderung akan berusaha untuk memperebut kekuasaan dengan segala cara, Hal ini akan menimbulkan konflik di internal partai politik sehingga akan terjebak dengan konflik internal yang mengganggu citra partai. Integritas Sebaliknya tingkat integritas kepala daerah sangat berperan untuk mencegah perilaku korupsi di daerah.⁴¹

Perilaku buruk yang sebagian ditampilkan oleh kepala daerah akan menjadi *role model* yang negatif bagi para bawahannya. Terganggunya pembangunan nasional akan berdampak pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia (Tannas) adalah merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang dapat dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Dalam rangka mempercepat pembangunan nasional guna menuju negara maju maka partai politik harus memilih kader terbaiknya untuk mengisi 514 kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) di seluruh Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut

⁴⁰ Ridho Imawan Hanafi. 2019. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁴¹ Op.Cit. hal. 78.

maka partai politik harus mengedepankan kepentingan sesuai dengan amanat konstitusi. Pimpinan yang kuat yang dipilih melalui seleksi yang ketat dan demokratis. Terkait rekrutmen kader secara jelas disebutkan dalam pasal 11 huruf e UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Terkait keadilan gender dapat dilihat kontestasi politik di Inggris dimana Elizabeth Truss terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris menggantikan Boris Johnson.

Jika 514 kepala daerah dijalankan oleh kepala daerah yang berkualitas maka hal tersebut akan memperkuat ketahanan nasional. Kepala daerah yang berkualitas akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan tugas kepada masyarakat. Warga negara dapat menilai kinerja pemerintah melalui mekanisme seperti pemilihan, sementara lembaga pemerintah dan pejabat saling mempertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional juga (kualitas prosedural).⁴² Pertanggungjawab kepala daerah sangat penting dalam rangka melihat sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dan sejauhmana dampaknya bagi kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Mengacu pada teori sifat orang – orang besar (*Traits of Great Men*) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa sosok pimpinan yang kapabel merupakan sosok pimpinan yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dalam melakukan tugasnya sehingga kemajuan yang dicapai didukung bawahannya. Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.⁴³

Partai politik harus segera melakukan kaderisasi dengan fokus pada manusia yang berkualitas seperti negara Eropa dan Amerika dimana kompetensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan negara tersebut dan menjadi pemimpin kelas dunia. Oleh karena itu maka kader yang

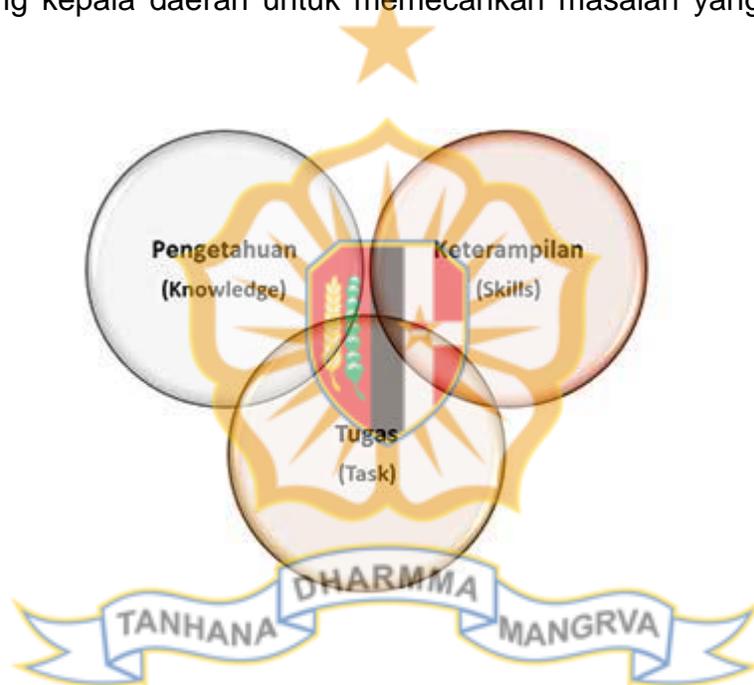
⁴² Warjio, Ph.D, *Mengukur Kualitas Demokrasi : Konsep, Lembaga dan Metodologi* (Jakarta, Kencana, 2022), hal. 105.

⁴³ https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180, diakses tanggal 5 Agustus 2022

memiliki kompetensi sangatlah diperlukan dengan mengacu pada teori sifat orang – orang besar. Kompetensi harus didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat. Kepala daerah yang kapabel harus memenuhi berbagai persyaratan antara lain :

a. Memiliki Level Pendidikan S3

Persyaratan ini sangat sebagai bekal pengetahuan dalam memecahkan masalah saat melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Setiap daerah memiliki permasalahan yang kompleks dan beragam sehingga membutuhkan pengetahuan untuk memecahkan masalah tersebut. Tanpa pengetahuan yang memadai maka akan sulit bagi seorang kepala daerah untuk memecahkan masalah yang dihadapi daerah tersebut.



Gambar 4. Kompetensi

b. Menguasai dan Memahami Teknologi

Teknologi berkembang sangat pesat dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kepala daerah yang memahami teknologi akan meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah pembangunan di daerah. Dengan memahami teknologi maka seorang kepala daerah akan mengarahkan penggunaan teknologi dalam memanfaatkan perberdayaan

sumber daya alam, mengatasi masalah demografi, geografi, ekonomi dan lain –lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Memahami Wawasan Kebangsaan Melalui Empat Konsesus Dasar

Pemahaman empat konsesus dasar pada kepala daerah harus telah mengkristal sehingga dalam pelaksanaan tugas akan lebih mengutamakan kepentingan nasional dari kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini juga dapat mencegah praktek korupsi dan pelanggaran lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas akan fokus untuk berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Melalui pemahaman empat konsesus dasar dapat memperkuat wawasan kebangsaan sehingga kepala daerah akan berbuat terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

1) Pancasila

Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, pandangan hidup bangsa menjadi instrumen utama dalam membangun bangsa yang berkepribadian tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dari luar maupun dalam negeri. Pancasila memberikan arah kepada setiap individu untuk melakukan perilaku dan tindakan yang menghargai nilai kemanusiaan dan agama. Partai politik seharusnya lebih paham dan disiplin dalam mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila dalam menjalankan operasionalnya terutama memperebutkan kekuasaan secara konstitusional. Kepala daerah yang terlibat korupsi telah merusak nilai – nilai Pancasila dan berdampak buruk bagi masyarakat. Partai politik harus menekankan pemahaman butir – butir Pancasila terhadap semua kader sehingga hal tersebut mampu mengatasi permasalahan perilaku dan kecintaan terhadap bangsa dan negara terutama terutam saat melaksanakan tugas sebagai kepala daerah.

2) Bhinneka Tunggal Ika

Dalam konteks Bihinneka Tunggal Ika, perilaku korupsi kepala daerah dapat menimbulkan gangguan terhadap kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat dimana korupsi dinikmati segelintir orang dan muncul sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa

yang dapat mengarah pada konflik horizontal. Sementara Indonesia sangat membutuhkan kohesi nasional yang merupakan gabungan dari kohesi sosial dari kotadmaya, kabupaten dan propinsi. Kepala daerah yang tidak kapabel dapat menggerus nilai Bhinneka Tunggal Ika sehingga daerah akan semakin rentan terhadap perpecahan. Partai politik harus menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika terhadap para kedernya terutama yang akan menjadi kepala daerah sehingga dalam perilaku dan tindakannya lebih mengutamakan kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok dan golongan.

3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang memberikan arah bagi bangsa Indonesia. Dalam pasal 1 (2) menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. ⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 memberikan arah dalam sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia sehingga perilaku koruptif sangat bertentangan dengan semangat UUD NRI 1945. Para kepala daerah yang merupakan sumber dari kader partai politik seharusnya menjalankan amanat UUD NRI 1945. Dalam menjalankan UUD NRI 1945 partai politik harus lebih memahami dalam menciptakan iklim demokrasi dengan melakukan tugas dan fungsi terutama dalam mencetak kader partai politik untuk menduduki jabatan kepala daerah.

4) Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. ⁴⁵ Hal ini menggambarkan bahwa negara Indonesia terdiri dari beberapa daerah yang tunduk dengan kewenangan pemerintah pusat sehingga kondisi ini harus dirawat dan dipertahankan agar tidak terjadi perubahan secara politik. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun dengan latar

⁴⁴ Devi Triasari, S.H. 2021. *MBusLaw, UUD 1945 dan Amandemen*. Yogyakarta : Charissa Publisher.

⁴⁵ Ibid. 65.

belakang sejarah, yang panjang. Negara kesatuan menurut C. F. Strong adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintah pusat.⁴⁶

Pasca kemerdekaan negara Indonesia, ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik terus terjadi yang dapat menimbulkan distegrasi sosial hingga disintegrasi nasional. Beberapa ancaman terhadap NKRI antara lain separatisme, etnonasionalisme, ideologi termasuk radikalisme. Radikalisme pada level yang paling ekstrem dapat mengarah pada aksi teroris yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.⁴⁷ Masalah teroris merupakan ancaman serius bagi dunia karena dapat menyebabkan korban jiwa. Upaya untuk memerangi terorisme harus difokuskan pada penyelesaian akan masalahnya (*core of the problem*) yaitu ketidakadilan.⁴⁸ Masalah ketidakadilan dapat dijadikan pintu masuk (*entry point*) bagi para *designer* radikalisme dalam memantapkan aksinya.

Kontribusi partai politik dalam menghasilkan calon kepala daerah yang kapabel diharapkan mampu mengatasi berbagai ancaman ideologi transnasional dan masalah lainnya dalam kehidupan masyarakat. Sementara partai politik masih bermain di wilayah transaksional sehingga perhelatan Pilkada membutuhkan biaya yang cukup besar dan mengeliminasi kader yang berkualitas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa ongkos menjadi bupati saja mencapai Rp. 30 miliar. Sementara untuk menjadi gubernur bisa lebih besar lagi ongkos yang dikeluarkan.⁴⁹ Antar partai politik menampilkan persaingan yang tidak sehat dalam meraih kekuasaan baik di pemerintahan maupun parlemen. Partai-partai di negara berkembang seperti Indonesia, konsep persaingan politiknya rata-rata memang masih bercorak kolusif dan kombatif. Politik sehat masih jauh dari Indonesia.⁵⁰

⁴⁶ Nurruddin Hady. 2019. *Negara Kesatuan : Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*. Malang : Setara Press.

⁴⁸ Azyumardi Azra. 2011. *Konflik Baru Antar Peradapan : Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

⁴⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121065042-32-450179/parpol-dan-calon-tak-mutu-problem-utama-ongkos-mahal-pilkada>, diakses tanggal 4 Agustus 2022.

⁵⁰ <https://investor.id/archive/partai-politik-masih-perlu-belajar-politik-sehat>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.

Partai politik seharusnya memahami secara komprehensif terkait sejarah terbentuknya NKRI yang diraih melalui perjuangan para pahlawan bangsa sehingga kondisi ini harus dipertahankan dan diisi dengan pembangunan yang cepat dan berkualitas guna mengejar ketertinggalan dengan negara – negara lain di dunia. Para elit partai harus menghilangkan ego sektoral tetapi solid dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun NKRI yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Peran strategis partai politik sangat relevan sesuai dengan amanat undang – undang yaitu untuk terlibat dalam pembangunan dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan yang harus diselesaikan oleh kepala daerah sehingga peran partai politik sangat penting dalam menghasilkan kepala daerah yang mampu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

d. Memiliki Moral dan Etika Yang Kuat

Moral dan etika merupakan elemen yang sangat penting dalam membentengi seorang kepala daerah untuk melakukan hal – hal yang melanggar norma hukum dan akan menampilkan tanggung jawab dan integritas yang terbaik untuk mencapai kesuksesan pembangunan daerah. Dengan memiliki moral dan etika yang kuat maka seorang kepala tidak mudah terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang telah diamanahkan kepada dirinya.

Sementara partai politik masih menyajikan kader kepala daerah yang belum sesuai dengan konsep demokratis dimana persyaratan yang telah ditetapkan belum dilaksanakan secara konsekuen. Kepala daerah yang kapabel akan bekerja di pemerintahan (*bureaucracy office*) harus profesional dan dapat menampilkan kinerja yang unggul dalam membangun daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dan membawa kemajuan. Langkah ini akan berdampak terhadap ketahanan ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.

15. Komunikasi Partai Politik Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi demokrasi pasca reformasi. Harapan publik yang sangat besar terhadap partai politik seharusnya

dieksekusi dengan baik sehingga perubahan demokrasi dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam tulisan ini, penulisan menggunakan beberapa teori untuk menganalisa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pengelolaan organisasi partai politik harus dikelola secara manajemen yang efektif dan efisien guna menghasilkan calon pimpinan yang kapabel. Teori manajemen yang disampaikan G.R. Terry menggambarkan bahwa manajemen adalah upaya mencapai suatu kemajuan organisasi melalui langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Komunikasi partai politik terkait kaderisasi kepala daerah harus dilakukan dengan prinsip manajemen agar terukur dan tidak terjadi penyimpangan dalam pemilihan di internal partai politik. Seluruh pimpinan partai politik harus memiliki komitmen yang kuat dalam proses kaderisasi.

Tindak komunikasi dalam partai politik dalam organisasi atau lembaga akan melibatkan empat fungsi / peran yaitu ⁵¹:

- a. Fungsi Informatif
- b. Fungsi Regulatif
- c. Fungsi Persuasif
- d. Fungsi Integratif

Fakta yang terjadi dalam kehidupan politik bahwa partai politik belum memainkan peran komunikasinya secara optimal dalam kehidupan demokrasi sehingga menimbulkan sikap skeptis publik terkait kinerja partai dalam menyerap aspirasi masyarakat terutama dalam memilih calon kepala daerah yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Partai politik harus melakukan komunikasi dengan konstituen dan masyarakat secara terbuka guna menyeleksi kader partai yang disiapkan untuk menduduki jabatan kepala daerah secara konstitusional. Komunikasi dan dinamika di era demokrasi modern sangat berbeda dengan saat awal munculnya demokrasi di Athena, Yunani dimana jumlah penduduk masih sedikit sehingga komunikasi dapat dilakukan secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Stephen D. Tansey dan Nigel Jackson dalam bukunya *Politics : today the size of modern democracies is no longer a barrier to*

⁵¹ <http://manajemenkomunikasi.blogspot.com/2010/08/teori-komunikasi-organisasi.html>, dikases tanggal 13 Agustus 2022

*the exercise of Athenian democracy.*⁵² Komunikasi sangat penting dilakukan untuk menyerapkan aspirasi masyarakat yang akan berdampak pada kualitas kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Proses komunikasi tidak dapat dilakukan secara cepat karena membutuhkan kerja keras partai politik agar aspirasi masyarakat kredibel dan dapat menjadikan kekuatan politik bagi partai politik dalam memenangkan kontestasi Pilkada setiap lima tahun sekali.



Gambar 5. Fungsi Manajemen Menurut G. R. Terry⁵³

Partai politik dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat dalam memilih calon kepala daerah harus memiliki komitmen dan menjaga pilihan masyarakat untuk maju dala Pilkada agar meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Manajemen komunikasi harus dilakukan oleh partai politik dalam menyerapkan aspirasi masyarakat untuk mencari sosok kader partai yang dinilai masyarakat layak untuk menjadi kepala daerah. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat

⁵² Stephen D. Tansey, Nigel Jackson. 2008. *Politics*. USA and Canada : Routledge.

⁵³ <https://mas-alahrom.my.id/eko/fungsi-fungsi-manajemen-dalam-pencapaian-keuntungan-perusahaan/>, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

dan untuk rakyat sehingga komunikasi politik menjadi elemen yang sangat penting guna memilih kepercayaan masyarakat.

Partai politik harus melakukan komunikasi politik untuk memilih calon kepala daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi harus dimanfaatkan secara maksimal dimana saluran ini terbagi dua yaitu komunikasi tidak langsung yang menggunakan media massa dan komunikasi tatap muka langsung yang biasa disebut komunikasi antar pribadi.⁵⁴

Model komunikasi politik

□ Model linear

Model ini menggambarkan arah linear komunikasi dari sumber, pesan dan penerima. Contoh model linear (Laswell) :



□ Model interaksi

Dalam model ini komunikasi politik dipandang sebagai proses aksi reaksi yang dinamis yang diantarai dengan adanya interpretasi atau proses pemaknaan dari penerima pesan.



Gambar 6. Model Komunikasi Politik⁵⁵

- a. **Komunikasi Tatap Muka.** Komunikasi tatap dapat memberikan efek langsung terhadap masyarakat karena melakukan kontak fisik langsung sehingga komunikator dapat melihat langsung reaksi dari aspirasi yang

⁵⁴ Ruslan Ismail Mage. 2009. *Industri Politik : Strategi Investasi Politik Dalam Pasar Demokrasi*. Jakarta : RMBOOKS.

⁵⁵ <https://slideplayer.info/slide/12127474/>, diakses tanggal 16 Agustus 2022

disampaikan terkait calon kepala daerah yang kapabel menurut masyarakat. Hal ini dapat memperjelas penilaian dan dapat melakukan *cross check* terhadap kader partai terkait kader yang kapabel. Komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat dapat menjadi evaluasi oleh partai politik untuk lebih meningkatkan kinerja partai dalam menghasilkan kader yang kapabel.

b. Komunikasi Menggunakan Media Digital. Dengan perkembangan era digital dimana setiap kegiatan masyarakat oleh teknologi komunikasi sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan komunikasi politik dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu melalui sarana media. Komunikasi partai politik melalui media sosial memiliki beberapa fungsi dimana terdapat tujuh fungsionalitas media sosial tersebut yaitu identitas (*identity*), percakapan (*conversation*), berbagi (*sharing*), kehadiran (*presence*), hubungan (*relationship*), kelompok (*group*) dan reputasi (*reputation*).⁵⁶

Dalam rangka memperkuat hasil dan kualitas komunikasi baik tatap muka maupun melalui media maka harus dilakukan dengan menggunakan langkah manajemen yaitu :

a. Perencanaan. Melakukan perencanaan yang detil sebelum pelaksanaan komunikasi kepada masyarakat baik yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial. Menyiapkan materi yang disampaikan terkait calon kepala daerah dengan menyerap aspirasi dari masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat baik tatap muka maupun dengan menggunakan media digital harus direncanakan secara matang sehingga pelaksanaan komunikasi dapat menggali aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Komunikasi tatap muka harus memanfaatkan pertemuannya dengan masyarakat secara maksimal dengan menyampaikan beberapa calon dari kader partai. Respon masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam memperoleh kader partai yang sangat diinginkan masyarakat. Komunikasi yang efektif akan memberikan gambaran bagi partai politik dalam mencetak kader untuk mengikuti Pilkada.

⁵⁶ Catur Nugroho, S.Sos., M.I.Kom. 2020. *Cyber Society : Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Jakarta : Kencana.

Sementara komunikasi melalui media digital dapat memanfaatkan komunikasi dengan masyarakat dengan menyampaikan beberapa kader partai yang telah dikader oleh partai politik untuk menjadi kepala daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik dan media sosial dengan memanfaatkan *smartphone* yang dimiliki masyarakat. Melalui komunikasi digital maka hubungan partai politik dan masyarakat dapat berjalan dengan intens dan partai politik harus merebut kepercayaan masyarakat terhadap kader partai yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah.

b. Pengorganisasian. Membuat tim komunikasi agar lebih produktif dan efektif dan mengetahui tugas yang harus dilakukan agar penyerapan aspirasi masyarakat lebih efektif baik melalui tatap muka dan media sosial. Pengorganisasian sangat penting untuk memperjelas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan tugas untuk memperkuat komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat lebih efektif. Dalam menjalankan tugasnya, setiap orang yang diberi tugas akan melakukannya dengan maksimal sehingga dapat menghindari kesalahan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat guna memperoleh calon kepala daerah terbaik yang berasal dari kader partai politik.

c. Pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan elemen penting guna mendapatkan calon kepala daerah yang disampaikan oleh masyarakat dimana hal ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan dalam mencari seorang pemimpin. Demokrasi memberikan kesempatan dan peluang yang seluas – luasnya bagi masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap sosok calon kepala daerah yang dinilai aspiratif dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Partai politik harus memiliki komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait calon kepala daerah yang dikehendaki oleh masyarakat. Partai politik harus melaksanakan apa yang menjadi pilihan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas partai. Dalam pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat baik tatap muka maupun

menggunakan media digital dengan memperhatikan sasaran masyarakat agar tujuan komunikasi lebih efektif. Elemen masyarakat terdiri dari kalangan intelektual dan profesi seperti mahasiswa, pedagang, petani, pekerja, dan lain – lain. Hal ini sangat penting agar komunikasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Semakin banyak aspirasi masyarakat yang diterima terkait calon kepala daerah maka hal tersebut semakin baik dan menunjukkan pilihan tersebut sangat diinginkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat menunjukkan keinginan yang kuat terhadap calon tertentu sehingga akan mengurangi biaya partai politik dalam mengusung kader partai yang akan menjadi kepala daerah. Aspirasi masyarakat yang kuat sejalan dengan adagium *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat tidak boleh dimanipulasi oleh tim komunikasi tetapi harus diperkuat dengan meningkatkan kemampuan manajerial, pengetahuan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan memperkuat etika moral calon kepala daerah.

d. Pengawasan. Pengawasan merupakan elemen untuk memastikan proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah secara demokratis. Melalui pengawasan detil dari perencanaan dapat berjalan dan dapat mengurangi kesalahan. Pasca pelaksanaan harus dilakukan analisa dan evaluasi agar pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Fakta yang terjadi dalam pemilihan calon kepala daerah yang dilakukan kurang menyerap aspirasi masyarakat dan cenderung mengedepankan kepentingan partai dapat dihindari dengan melakukan fungsi manajemen yang benar.

Pengawasan harus dilakukan secara internal dan eksternal agar pengawasan lebih kuat sehingga pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal dan tidak dimanipulasi oleh internal partai politik. Hal ini akan meningkatkan kompetisi para kader di internal partai politik untuk meningkatkan kualitas diri. Hal ini akan berdampak pada kinerja untuk melakukan kaderisasi calon kepala daerah yang kapabel dan diharapkan semua partai politik akan melakukan langkah yang sama.

BAB IV

PENUTUP

16. SIMPULAN

Partai Politik yang berkualitas adalah partai politik yang mampu menciptakan pemerintahan yang efisien dan dapat menyerap aspirasi masyarakat guna mencapai keamanan dan kesejahteraan. Pasca reformasi diharapkan iklim demokrasi menjadi lebih baik dengan muncul banyaknya partai politik diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat ternyata faktanya partai politik masih terjebak dalam kepentingan pragmatis sehingga tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Perjalanan reformasi selama 24 tahun masih memerlukan pembenahan dalam konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi diharapkan mampu terwujud dengan semangat elemen demokrasi untuk melakukan perubahan berkaitan dengan peran partai politik dalam mencetak calon kepala daerah yang belum optimal. Untuk mencapai hal tersebut maka partai politik segera melakukan pembenahan dalam mengusung kader partai untuk menjadi kepala daerah dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

a. **Proses Kaderisasi Kepala Daerah Oleh Partai Politik**

Partai politik merupakan organisasi besar yang memiliki kewenangan strategis menciptakan iklim demokrasi yang berkelanjutan. Peran partai politik dalam kaderisasi calon kepala daerah harus menghasilkan orang hebat. Partai politik harus segera mengatasi krisis kepala daerah yang banyak terlibat kasus korupsi. Pembenahan secara cepat harus segera dilakukan guna mengembalikan kepercayaan publik. Kepentingan politis harus dihilangkan tetapi lebih mengutamakan kepentingan nasional dengan melakukan kaderisasi secara demokratis dan hal tersebut disampaikan ke publik. Hal ini sejalan dengan teori situasi historik yang menjelaskan keberadaan partai politik untuk mengatasi krisis dalam masyarakat seperti legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Jika partai politik tidak dapat mengatasi krisis kepala daerah yang berkualitas maka akan

muncul sebagai masyarakat untuk melakukan pembenahan dengan mendirikan partai politik. Hal ini tentunya akan menambah jumlah partai politik sebagai respon terhadap hal – hal yang belum dapat diselesaikan seperti masalah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Selama pelaksanaan Pilkada pasca reformasi, partai politik belum melakukan kaderisasi dan pemilihan secara demokratis dimana hasil pilihan yang menjadi kepala daerah sebagian besar terlibat perilaku korupsi dan pelanggaran lainnya. Berdasarkan kajian dalam penulisan ini terdapat *fact gap* antara peran partai politik yang diharapkan dalam konsolidasi demokrasi terutama dalam proses kaderisasi kader partai untuk menjadi kepala daerah dengan tidak berjalannya mekanisme seleksi sesuai dengan aturan sehingga hal ini menyebabkan produk kepala daerah yang dihasilkan masih melakukan kinerja yang tidak maksimal dan cenderung terlibat praktek korupsi yang sangat mengecewakan rakyat. Hal ini terjadi berulang kali dan kepala daerah yang dihasilkan merupakan hasil Pilkada yang berjalan pasca reformasi. Partai politik harus menampilkan wajah baru dalam kaderisasi calon kepala daerah dengan melakukan pemilihan secara demokratis sesuai dengan pasal 11 huruf e UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh partai politik dalam mempercepat konsolidasi demokrasi dimana partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam perjalanan bangsa. Fokus dalam penulisan ini, peran partai politik dalam kaderisasi kader partai untuk menjadi kepala daerah dimana hal tersebut diperoleh melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Fakta yang terjadi tidak sejalan dengan harapan dimana kaderisasi cenderung lebih diwarnai dengan kepentingan politis.

Partai politik harus segera membenahi hal tersebut agar lebih kompetitif dan dapat mempercepat konsolidasi demokrasi. Melalui SCRS analysis maka dapat mengembalikan tekad partai politik untuk menciptakan pemerintahan efektif dengan menghadirkan kepala daerah yang kapabel. SCRS analysis dimulai dengan *strategy* (strategi) yang dilakukan oleh partai politik untuk membenahi permasalahan yang sedang terjadi. *Current State* (kondisi nyata)

merupakan permasalahan aktual yang dihadapi oleh partai politik selama pasca reformasi terutama kaderisasi calon kepala dimana hasilnya belum menampilkan kinerja yang belum maksimal. *Requirement* (persyaratan) menganalisa persyaratan yang harus dijalankan dengan penuh komitmen oleh partai politik dalam menyeleksi calon kepala daerah. Sementara *solution* (pemecahan masalah) merupakan hasil akhir dari analisa yang telah dilakukan dengan menghasilkan kepala daerah yang kapabel dan sangat diharapkan masyarakat.

Strategi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pembenahan partai politik dalam melakukan kaderisasi calon kepala daerah. Strategi yang harus dilakukan partai politik antara lain :

- 1) Meningkatkan pendidikan politik.
- 2) Melakukan pembinaan kader partai yang profesional.
- 3) Melakukan pemilihan yang demokratis.
- 4) Menghilangkan mahar politik dan jual beli suara.
- 5) Mengimplementasikan *punishment and reward* secara tegas.

b. Peran Partai Politik Dalam Menghasilkan Kepala Daerah Yang Kapabel

Evaluasi terhadap produk kepala daerah yang masih belum maksimal maka partai politik harus segera meninggalkan pola yang kontraproduktif dimana cenderung calon kepala daerah yang dipilih tidak melalui mekanisme transparan. Mengacu pada teori orang – orang hebat (*traits of great men*) yang menggambarkan sosok pimpinan yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdesaan emosional dalam melakukan tugasnya sehingga kemajuan yang dicapai didukung bawahannya.

Partai politik harus segera melakukan analisa dan evaluasi secara komprehensif agar kader partai yang menduduk jabatan kepala daerah dapat lebih kompetitif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi era globalisasi dimana persaingan semakin kompetitif. Kepala daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat pembangunan di daerah dengan mengelola astagatra yang harus dilakukan secara profesional. Setiap daerah memiliki

sumber kekuatan terutama tri gatra (sumber kekayaan alam, demografi dan geografi) sehingga hal tersebut harus dikelola agar mengalami peningkatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan trigatra yang didukung dengan ketrampilan dan pengetahuan akan berpengaruh terhadap pancagatra (ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan) di 514 daerah. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional sehingga mampu bersaing dengan negara – negara maju.

Peran partai politik yang tidak maksimal dan masih mempertahankan *comfort zone* (zona nyaman) akan mempengaruhi pergerakan bangsa terutama dalam mencapai Indonesia emas tahun 2045. Banyaknya permasalahan yang masih terjadi di berbagai daerah seperti kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, kesejangan sosial dan lain – lain yang harus segera diatasi dalam waktu cepat sehingga bangsa Indonesia tidak terjebak dengan masalah selalu terjadi. Kemampuan kepala daerah yang kapabel sangat diperlukan untuk membenahi hal tersebut.

Peran partai politik dalam mengasihkan kepala daerah yang kapabel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki level pendidikan S3.
- 2) Menguasai dan memahami teknologi.
- 3) Memahami wawasan kebangsaan melalui empat konsesus dasar.
- 4) Memiliki moral dan etika yang kuat

c. Komunikasi Partai Politik Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Kaderisasi Kepala Daerah

Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik yang dinilai belum efektif dimana komunikasi yang terjadi belum dapat menyerap aspirasi masyarakat terkait calon kepala daerah yang diinginkan masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan melalui tatap muka dan melalui media sosial. Partai politik dalam mengelola komunikasi harus melakukannya secara terarah. Manajemen komunikasi politik terhadap masyarakat dilakukan dengan melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengawasan. Hal ini sangat penting guna mengawal aspirasi masyarakat dalam mencari calon kepala daerah yang kapabel. Dengan melakukan fungsi manajemen dalam melakukan komunikasi maka proses menyaring aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif terutama dengan menggunakan media digital.

17. REKOMENDASI

Dalam rangka mempercepat konsolidasi demokrasi melalui peran partai politik guna memperkuat ketahanan nasional maka partai politik harus melakukan langkah strategis dalam memilih kepala daerah agar pembangunan di seluruh daerah dapat optimal. Adapun langkah strategis yang harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Presiden Republik Indonesia mengimbau pimpinan partai politik untuk mengevaluasi produk kepala daerah guna meningkatkan kualitas kaderisasi calon kepala daerah di internal partai politik.
- c. Mahkamah Agung menegakkan hukum yang tegas dengan menganulir kemenangan Pilkada yang terbukti melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada.
- b. Kemenko Polhukam meningkatkan kerjasama dengan pimpinan partai politik guna meningkatkan wawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional.
- d. Kemendagri meningkatkan dukungan anggaran partai politik sesuai dengan amanat pasal 34 ayat 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa keuangan partai politik bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini sangat penting guna mengarahkan partai politik untuk mengutamakan kepentingan nasional.
- e. Gubernur Lemhannas melakukan penilaian kinerja kepala daerah melalui Laboratorium Pengukuran Pimpinan Nasional dan menyampaikan hasil penilaian

kepada Presiden RI guna memberikan masukan kepada pimpinan partai politik untuk meningkatkan kaderisasi kepala daerah.

f. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada dan menindak kader partai politik yang melakukan *money politic* dan pelanggaran lainnya saat melaksanakan Pilkada.

g. Media massa harus mengawal proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah guna mengeliminir mahar politik dan jual beli suara dalam rangka menghasilkan kepala daerah yang kapabel dan mengutamakan kepentingan nasional.

h. Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengawal proses demokrasi dengan mengimbau masyarakat untuk anti mahar politik dan jual beli suara dalam pelaksanaan Pilkada.

i. Seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan poses Pilkada dan menghindari upaya jual beli suara yang dilakukan oleh partai politik.

i. Partai politik :

1) Mendeklarasikan komitmen dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi melalui kaderisasi calon kepala daerah yang kapabel, memiliki moral dan etika yang baik dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi.

2) Meningkatkan kualitas moral dan etika terhadap semua kader partai guna memperkuat kredibilitas partai sehingga kepala daerah yang terpilih akan menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab dan menghindari perbuatan pidana.

3) Melakukan kaderisasi kader partai melalui konvensi terbuka dan disaksikan oleh publik dengan menampilkan kader – kader terbaik partai sehingga hal tersebut dapat menjadi amunisi partai untuk mempercepat

pembangunan di berbagai daerah yang akan berdampak pada ketahanan nasional.

4). Menerapkan *punishment and reward* terhadap seluruh kader partai guna meningkatkan kepercayaan internal partai dan eksternal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para kader terhadap partai politik dan kepercayaan masyarakat.

5) Menghindari *money politic* dalam proses kaderisasi kader partai yang akan mengikuti kontestasi politik Pilkada dan mendorong kader yang berkualitas untuk maju dalam setiap Pilkada.

6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompetitif melalui pendidikan dan pelatihan di internal partai sehingga dapat memunculkan kader – kader yang berkualitas di masa yang akan datang.

7) Meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat dalam mencari calon kepala daerah yang kapabel dan hasil aspirasi masyarakat ditampilkan melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan kepercayaan publik.

8) Mewajibkan kepada kepala daerah terpilih untuk menyampaikan kemajuan kinerjanya kepada masyarakat secara periodik kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Hal ini sangat penting dalam mengukur ketahanan daerah dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional.

9) Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala daerah secara periodik dalam rangka menjamin kemajuan pembangunan daerah agar terjaminnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.



Daftar Pustaka

- Adi Toegarisman. 2018. *Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional*. Jakarta : Buku Kompas.
- Adies Kadir. 2018 *Menjaga Moral Pejabat Publik*. Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama.
- Agung Pambudhi. 2021. *Janji Otonomi Daerah : Perspektif Ekonomi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Azyumardi Azra. 2011. *Konflik Baru Antar Peradapan : Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Bonar Simangunsong, Daulat Sinuraya. 2011. *Negara, Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta : Kharisma Virgo Print.
- Devi Triasari, S.H., MBusLaw. 2021 *UUD 1945 dan Amandemen*. Yogyakarta : Charissa Publisher.
- Encik Muhammad Fauzan.. 2017 *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Georg Sorensen. 2002. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hendarmin Ranadireksa. 2009. *Visi Bernegara Arsitektur Kontruksi Demokratik*. Bandung : Fokus Media.
- Kartini Kartono. 1991. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Lili Romli, Partai Politik. 2021 *Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia*. Malang : Intrans Publishing.
- Miriam Budiardjo. 2021. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perbedaan hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nurrudin Hady. 2019. *Negara Kesatuan : Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*. Malang : Setara Press.
- Risa Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya, Serbajaya

Ridho Imawan Hanafi. 2021. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ruslan Ismail Mage. 2009. *Industri Politik : Strategi Investasi Politik Dalam Pasar Demokrasi*. Jakarta : RMBOOKS.

Stephen D. Tansey, Nigel Jackson. 2008. *Politics*. USA and Canada : Routledge

Steven Levitsky, Daniel Ziblitz. 2021. *Bagaimana Demokrasi Mati : Apa Yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Warjio, Ph.D. 2022. *Mengukur Kualitas Demokrasi : Konsep, Lembaga dan Metodologi*. Jakarta, Kencana.

Pokja Sistem Manajemen Nasional, 2022. Materi Pokok Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional, hal.78

Pokja Ketahanan Nasional Lemhannas, 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional, hal.41

<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-0>, diakses tanggal 16 Mei 2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/21/160000069/demokrasi-pengertian-sejarah-singkat-dan-jenis?page=all>, diakses tanggal 18 Maret 2022.

<https://www.radarcirebon.com/2018/10/27/tim-sukses-penyebab-kepala-daerah-korupsi-ini-penjelasan-kemendagri/>, diakses tanggal 16 Mei 2022

https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=637&keywords=, diakses tanggal 20 Mei 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/r9r9i9396/survei-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-terendah-tni-paling-tinggi>, diakses tanggal 7 Juni 2022

<https://kumparan.com/kumparannews/pukat-ugm-korupsi-di-pemda-memprihatinkan-sudah-561-kasus-sejak-2004-1vVyB8cupgc/1/gallery/2>, diakses tanggal 16 Juni 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/2018-darurat-korupsi-kepala-daerah-1t5c225b3630aa2?page=2>, diakses tanggal 17 Juni 2022

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1627.pdf>, diakses tanggal 18 Juni 2022

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>, diakses 20 Juni 2022

https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf, diakses tanggal 26 Juli 2022.

<https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>, diakses tanggal 27 Juli 2022.

<https://www.kompasiana.com/herdiansyah/55006c07a333111d72510bff/anatomi-korupsi>, diakses tanggal 29 Juli 2022

<https://investor.id/archive/partai-politik-masih-perlu-belajar-politik-sehat>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.

<https://kumparan.com/awang-dharmawan/matinya-kaderisasi-partai-politik-dalam-pilkada-1uBA1hN5mYJ/full>, diakses tanggal 2 Agustus 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121065042-32-450179/parpol-dan-calon-tak-mutu-problem-utama-ongkos-mahal-pilkada>, diakses tanggal 4 Agustus 2022.

<https://kumparan.com/awang-dharmawan/matinya-kaderisasi-partai-politik-dalam-pilkada-1uBA1hN5mYJ/full>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180, diakses tanggal 5 Agustus 2022

<https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

<https://www.suaralidik.com/inilah-6-partai-baru-bakal-berpartisipasi-pada-pemilu-2024/>, diakses tanggal 12 Agustus 2022.

<https://mudanews.com/opini/2021/07/31/erosi-demokrasi/>, diakses tanggal 13 Agustus 2022

<https://slideplayer.info/slide/12127474/>, diakses tanggal 16 Agustus 2022



KONSOLIDASI DEMOKRASI MELALUI PERAN PARTA POLITIK DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



TABEL

TABEL 1 KORUPSI KEPALA DAERAH SEJAK TAHUN 2002 HINGGA TAHUN 2020

TABEL 2 23 KEPALA DAERAH YANG TERTANGKAP TANGAN KPK SELAMA 2018



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 19 KEPALA DAERAH TERJARING OTT KPK DI TAHUN 2018

GAMBAR 2 114 KEPALA DAERAH DALAM JERATAN KPK

GAMBAR 3 ENAM PARTAI POLITIK BARU

GAMBAR 4 KOMPETENSI

GAMBAR 5 FUNGSI MANAJEMEN MENURUT G.R. TERRY

GAMBAR 6 KOMUNIKASI POLITIK





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : WIRDO NEFISCO,SIK, MSi
TEMPAT/TGL : PALEMBANG,3 PEBRUARI1970
LAHIR AGAMA : ISLAM
PANGKAT/ : KOMBESPOL/ 70020386
NRP JABATAN : ANALIS UTAMA TINGKAT II BAINTELKAM POLRI
NOHP/ EMAIL : 085340434199 / wnefisco@gmail.com

A. PENDIDIKAN UMUM:

- SD
- SMP
- SMA
- 51
- 52



B. PENDIDIKAN KEPOLISIAN:

- AKPOL
- PTIK
- SESPIM



C. RIWAYAT PANGKAT:

- IPDA
- IPTU
- AKP
- KOMPOL
- AKBP
- KOMBESPOL

D. RIWAYAT JABATAN

- PAMAPTA POLRESBERAU POLDA KALTIM
- KAPOLSEKGUNUNG TAB~R POLRESBERAU POLDA KALTIM
- KAPOLSEKSANGATTA POLRESBONTANG POLDA KALTIM
- KASAT IPP POLRESBONTANG POLDA KALTIM

- e. PAUR SESDITIPP POLDA KALTIM
- f. PANIT A 2.1 DITA BAINTELKAM POLRI
- g. KANIT D 3.2 DIT D BAINTELKAM POLRI
- h. KAPOLRES TOJO UNA- UNA POLDA SULTENG
- i. WADIR INTELKAM POLDA GORONTALO
- j. KABID PROPAM POLDA GORONTALO
- k. DIRINTELKAM POLDA BANTEN
- l. KAPOLRESTABANDAR LAMPUNG
- m. KABID PROPAM POLDA KALTIM
- n. AGEN INTELIJENMADYA TINGKAT III BAINTELKAM POLRI
- o. ANALIS UTAMA TINGKAT II BAINTELKAM POLRI.

E. KEMAMPUAN BAHASA ASING:

- a. INGGRIS
- b. PERANCIS

F. PENGALAMAN LUAR NEGERI:

- a. AMERIKA
- b. AUSTRALIA
- c. ITALI
- d. CHINA
- e. KOREASELATAN
- f. MALAYSIA
- g. SINGAPORE

G. PENGHARGAN

- a. BINTANG BHAYANGKARA NARARIYA
- b. SATYALENCANA PENGABDIAN XXIV TAHUN



Jakarta, Oktober 2022

Wirdo Nefisco, S.I.K., M.Si
Kombes Pol. NRP. 70020386

